



Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi





Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019

Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Tim Penyusun :

Lukman Solihin
Bakti Utama
Indah Pratiwi
Novirina

Olah Data:

Imelda Widjaja
Ika Hijriani
Khairur Raziqin
Melfin Zaenuri

Narasumber Ahli:

Dr. Tiodora H. Siagian
Novia Budi Parwanto, Ph.D.

Penyunting:

Lukman Solihin

Desain sampul dan isi:

Genardi Atmadiredja

Foto Sampul:

pxhere Free of copyrights.

Foto Isi:

Lukman Solihin

ISBN: 978-602-0792-15-6

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, April 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

“Demokrasi hanya akan berkembang
di suatu masyarakat yang para warganya
adalah pembaca, adalah individu-individu
yang merasa perlu untuk membaca,
bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.”

(Daoed Joesoef, dalam *Bukuku Kakiku*, 2004).

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Penelitian Peningkatan Literasi Melalui Indeks Literasi Nasional. Penelitian ini merupakan upaya Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan tingkat aktivitas literasi di 34 provinsi di Indonesia sehingga menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) 2018.

Dari indeks ini dapat dipahami bahwa tingkat aktivitas literasi masyarakat kita masih tergolong rendah. Melalui empat dimensi yang menjadi tolok ukur, yaitu *dimensi kecakapan*, *dimensi akses*, *dimensi alternatif*, serta *dimensi budaya* terlihat bahwa hanya pada dimensi kecakapan saja masyarakat kita sudah cukup baik, sementara di tiga dimensi lainnya masih perlu didorong kemajuannya.

Kami berharap Indeks Alibaca dapat bermanfaat bagi pengembangan program Gerakan Literasi Nasional (GLN), yang menjadi program prioritas Kemendikbud. Begitu pula, pemerintah daerah, pegiat literasi, serta masyarakat umum dapat memanfaatkannya sebagai pedoman guna menyokong aktivitas literasi di daerah masing-masing. Dengan mengetahui aspek apa saja yang masih perlu dimajukan, maka upaya untuk meningkatkan aktivitas literasi di berbagai daerah di Indonesia dapat lebih terarah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan laporan penelitian ini.

Jakarta, April 2019

Kepala Pusat,

Muktiono Wasposito

KATA PENGANTAR

Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memacu peningkatan literasi masyarakat. Program ini mewujud dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Bangsa, serta berbagai program lainnya untuk mendorong aktifnya gerakan literasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Namun, sejauh ini upaya pemetaan terhadap tingkat aktivitas literasi masyarakat belum dilakukan secara memadai. Berbagai kajian umumnya dilakukan dalam lingkup yang kecil baik melalui studi kasus maupun survei terbatas, sehingga tidak mampu memberikan gambaran secara nasional, maupun gambaran yang lebih khusus di tingkat provinsi.

Kajian ini berupaya untuk merespon kebutuhan perlunya peta kondisi literasi masyarakat secara nasional dengan menelaah dua hal, yaitu (1) mengkaji dimensi dan indikator yang dapat merepresentasikan aktivitas literasi membaca; dan (2) menentukan cara penyusunan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca sampai di tingkat provinsi. Mengingat luasnya makna ‘literasi’ yang berkembang di masyarakat, kajian ini hanya membatasi pada literasi membaca. Dengan demikian, indikator yang disusun untuk mengukur indeks aktivitas literasi membaca tersebut diharapkan dapat merepresentasikan kenyataan yang sebenarnya.

Hasil kajian ini ialah Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) yang berguna untuk mengukur tingkat aktivitas literasi membaca pada 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap hasil tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan program Gerakan Literasi Nasional agar ke depan dapat lebih optimal lagi.

Hasil penelitian ini tentu belum sempurna, sehingga tim peneliti membuka diri apabila terdapat masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan hasil kajian ini. Namun demikian, dari segala keterbatasan tersebut, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada upaya peningkatan literasi masyarakat Indonesia.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penelitian ini, antara lain Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat Ditjen Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Perpustakaan Nasional, Forum Taman Bacaan Masyarakat, Pustaka Bergerak Indonesia, serta individu dan perorangan yang menjadi narasumber, informan, maupun sebagai pribadi yang memberikan masukan terhadap rancangan dan hasil dari kajian ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tiodora H. Siagian, Dr. Novia Budi Parwanto, dan Mohammad Dokhi, Ph.D. dari Politeknik Statistika STIS yang mengawal proses penyusunan indeks ini.

Selamat membaca.

Jakarta, April 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan, Keluaran, dan Manfaat	8
BAB II KONSEP INDEKS ALIBACA	11
2.1. Batasan Konsep Literasi	11
2.2. Kajian Pustaka	12
2.2.1. Kajian Literasi di Masyarakat	14
2.2.2. Kajian Literasi di Sekolah	16
2.3. Kerangka Konseptual	20
BAB III METODOLOGI	29
3.1. Pengertian Indeks	29
3.2. Pemerian Dimensi dan Indikator	31
3.3. Pengumpulan Data	34
3.4. Proses Penyusunan Indeks	36
3.5. Kategori Tingkat Aktivitas Literasi	48
3.6. Keterbatasan Penelitian	49
BAB IV INDEKS AKTIVITAS LITERASI MEMBACA	53
4.1. Indeks Alibaca Nasional	53
4.2. Indeks Alibaca Provinsi	57
BAB V PRAKTIK BAIK PENYELENGGARAAN FASILITAS LITERASI PUBLIK	67
5.1. Peran Pemerintah Daerah	68
5.2. Peran Sekolah melalui Program GLS	72
5.3. Peran Perpustakaan Komunitas	75
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	79
6.1. Kesimpulan	79
6.2. Rekomendasi	82

DAFTAR TABEL, BAGAN, DAN GRAFIK

Tabel

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Perpustakaan	5
Tabel 1.2. Jumlah Jaringan Toko Buku di Indonesia	5
Tabel 3. 1. Pemerian Dimensi dan Indikator	32
Tabel 3. 2. Batas Minimum dan Maksimum	38

Bagan

Bagan 2. 1. Menuju Masyarakat Berbudaya Baca	21
Bagan 2. 2. Interaksi antar-faktor yang memengaruhi aktivitas literasi	22
Bagan 2. 3. Kerangka Konseptual Indeks Alibaca.	23
Bagan 3. 1. Tahapan Proses Penyusunan Indeks Alibaca	48

Grafik

Grafik 1.1. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Media	6
Grafik 4.1. Indeks Alibaca Nasional Menurut Dimensi	54
Grafik 4.2. I Nilai Per Indikator pada Indeks Indeks Alibaca Nasional	56
Grafik 4.3. Jumlah Provinsi Menurut Tingkat Aktivitas Literasi	57
Grafik 4.4. Indeks Alibaca Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah	58
Grafik 4.5. Indeks Dimensi Kecakapan Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah	60

Grafik 4.6. Indeks Dimensi Akses Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah	61
Grafik 4.7. Indeks Dimensi Alternatif Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah	62
Grafik 4.8. Indeks Dimensi Budaya Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah	63
Grafik 5.1. Jumlah Perda Mengenai Perpustakaan	69
Grafik 5.2. Jumlah Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak	76

DAFTAR SINGKATAN

ACDP	: <i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
AKSI	: Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Balitbang	: Badan Penelitian dan Pengembangan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
EGRA	: <i>Early Grade Reading Assessment</i>
FTBM	: Forum Taman Bacaan Masyarakat
GLN	: Gerakan Literasi Nasional
GLS	: Gerakan Literasi Sekolah
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
INAP	: <i>Indonesia National Assessment Programme</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Alibaca	: Indeks Aktivitas Literasi Membaca
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIR	: Karya Ilmiah Remaja
MPK	: Mobil Perpustakaan Keliling
Lakip	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
NBCL	: <i>Nation Building Corner Library</i>
PBI	: Pustaka Bergerak Indonesia
PDSPK	: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Perda	: Peraturan Daerah
Perpusnas	: Perpustakaan Nasional
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
Puslitjak Dikbud	: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Puspendik	: Pusat Penilaian Pendidikan
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SAE	: <i>Small Area Estimation</i>
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
MSBP	: Modul Sosial Budaya Pendidikan
TBM	: Taman Bacaan Masyarakat
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia telah memungkinkan pemberantasan buta aksara dengan hasil yang signifikan. Tercatat sejak pencanangan proyek SD Inpres (Instruksi Presiden) pada 1973, upaya untuk meluaskan akses pendidikan telah mendorong angka partisipasi anak usia sekolah serta mampu menekan angka buta aksara (Panji Hidayat, 2016). Presiden Soeharto bahkan menerima The Avicena Award dari UNESCO pada 1993 sebagai penghargaan atas keberhasilannya menerapkan wajib belajar 6 tahun melalui proyek SD Inpres.¹

Pemberantasan buta aksara turun cukup signifikan, dari 39,1 persen penduduk yang buta huruf di tahun 1971, menyusut menjadi 28,8 persen di tahun 1980, kemudian turun lagi menjadi 15,9 persen di tahun 1990 (*Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*, 2015). Keberhasilan pemberantasan buta aksara dilanjutkan di era Reformasi yang berhasil menekan angka buta aksara menjadi 10,1 persen di tahun 2000, 6,3 persen di tahun 2010, dan tersisa 4,4 persen pada 2014 (*Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*, 2015).

1 <http://kepuustakaanpresiden.pnri.go.id>

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas buta aksara dan meluaskan akses pendidikan sayangnya belum diikuti dengan keberhasilan dalam menumbuhkan budaya baca masyarakat, sehingga tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Berbagai survei menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada 2015 misalnya, memosisikan Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Selama kurun waktu 2012 – 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan untuk sains naik dari 382 menjadi 403, dan skor matematika naik dari 375 menjadi 386. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9 – 14 tahun berada di peringkat sepuluh terbawah. (Panduan GLN 2017, Kemdikbud)

Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)/*Indonesia National Assessment Programme* (INAP) yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains bagi anak sekolah dasar juga menunjukkan hasil serupa. Secara nasional, untuk kategori kurang dalam kemampuan matematika sebanyak 77,13 persen, kurang dalam membaca 46,83 persen, dan kurang dalam sains 73,61 persen (Panduan GLN 2017, Kemdikbud). Sementara survei Central Connecticut State University memosisikan Indonesia di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei, hanya setingkat di atas Botswana.² Kajian ini mengurutkan tingkat literasi negara-negara yang disurvei dengan menggunakan beberapa variabel, seperti hasil PISA, jumlah perpustakaan, sirkulasi surat kabar, sistem pendidikan, dan ketersediaan komputer³

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Gerakan Literasi Nasional telah

2 <http://www.thejakartapost.com>

3 <http://www.ccsu.edu/wmln/methodology.html>

mendorong tumbuhnya budaya baca, salah satunya dapat dipantau melalui penyelenggaraan GLS. Melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang mana salah satu tujuannya berupaya untuk memperkuat budaya literasi siswa, banyak sekolah mulai menerapkan kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Pembiasaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat baca serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Hasil pemantauan pelaksanaan GLS sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 5.360 sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Angka tersebut di luar sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program literasi sebelum GLS diluncurkan pada 2016. (*Kilasan Kinerja 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*).⁴

Namun tantangan program GLS masih cukup besar. *Pertama*, kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung program GLS, yakni perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan sekolah masih jauh dari memadai. Jumlah perpustakaan SD terdata sekitar 61,45 persen dari seluruh jumlah sekolah, tetapi hanya 19 persen di antaranya dalam kondisi baik; SMP sebanyak 76,25 persen dan hanya 22 persen dalam kondisi baik; SMA sekitar 76,40 persen dan hanya 33 persen dalam kondisi baik; SMK sejumlah 60,34 persen dan hanya 27 persen dalam keadaan baik (*Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017*, Kemendikbud).

Kedua, sekolah-sekolah yang telah melaksanakan program GLS terancam tidak berkelanjutan apabila tidak didukung dengan adanya sarana dan prasarana, serta SDM pengelola perpustakaan sekolah yang memadai guna mendukung program GLS sebagai program berkesinambungan. Sebagai contoh, ketiadaan pasokan bacaan baru dapat membuat siswa tidak lagi tertarik membaca karena merasa bosan. Selain itu, ketiadaan pustakawan yang mengelola perpustakaan

4 Sampai saat ini, jumlah sekolah yang menerapkan GLS belum diketahui dengan pasti.

sekolah dapat mengurangi peran dan fungsi perpustakaan sekolah sebagaimana mestinya.⁵

Kedudukan perpustakaan sekolah sangat krusial baik dalam menunjang proses pembelajaran maupun dalam program GLS. Idealnya, kuantitas perpustakaan sekolah seharusnya sepadan dengan jumlah sekolah (Pasal 23, UU No.43/2007 tentang Perpustakaan). Kedudukan perpustakaan sekolah menjadi penting karena di tingkat SD keberadaannya melayani 25,3 juta siswa, di tingkat SMP melayani lebih dari 10 juta siswa, SMA 4,7 juta siswa, dan SMK 4,8 juta siswa.⁶ Data itu belum ditambah dengan jumlah siswa di sekolah madrasah maupun pesantren yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Kedua, kondisi literasi keluarga dan masyarakat juga mengalami tantangan serupa mengingat minimnya jumlah perpustakaan umum dan toko buku. Apabila perpustakaan sekolah melayani program literasi di sekolah, maka pada parameter kedua, perpustakaan umum melayani kebutuhan literasi di luar sekolah, yaitu masyarakat umum. Data yang dilansir oleh Perpustakaan Nasional (*Lakip Perpusnas 2016*) menyebutkan bahwa tingkat ketersediaan perpustakaan secara nasional baru terpenuhi 20 persen, yakni baru 154.359 perpustakaan dari rasio kebutuhan sebesar 767.951 perpustakaan. Adapun perpustakaan umum, yakni perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, sampai desa, serta perpustakaan komunitas (Pasal 22 UU No.43/2007 tentang Perpustakaan) baru mencapai ketersediaan 26 persen dari rasio yang dibutuhkan.

5 Salah satu kesimpulan kajian yang dilakukan Tim Peneliti Puslitjak Dikbud (2015), “Peran Sekolah dalam Menumbuhkan Budaya Baca”.

6 Data jumlah siswa sebagaimana tercantum di situs <http://dapo.dikdasmen.kemdik-bud.go.id/> diakses pada: 5 Mei 2018.

Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Perpustakaan. Sesuai dengan Wilayah, Lembaga dan Satuan Pendidikan

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	TINGKAT KETERSEDIAAN
		Jumlah	Jumlah	%
1	Perpustakaan Nasional	1	1	100
2	Perpustakaan Umum	23.611	91.191	26
a.	Perpustakaan Umum Provinsi	33	34	97
b.	Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	467	515	91
c.	Perpustakaan Umum Kecamatan	600	7.094	8
d.	Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	21.467	82.505	26
e.	Perpustakaan Komunitas	693	693	100
f.	Taman Bacaan	351	351	100
3	Perpustakaan Khusus	7.132	384.633	2
4	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	121.187	287.631	42
a.	SD/MI	100.000	174.179	57
b.	SMP/MTs	12.000	56.620	21
c.	SMA/SMK/MA	6.599	35.581	19
d.	Pondok Pesantren	2.588	21.251	12
5	Perpustakaan Pendidikan Tinggi	2.428	4.496	54
JUMLAH		154.359	767.951	20

Sumber: LAKIP Perpunas 2016.

Disparitas antara ketersediaan dan kebutuhan perpustakaan umum di atas terutama terletak di tingkat perpustakaan kecamatan yang baru terpenuhi 8 persen dan perpustakaan desa yang baru terpenuhi 26 persen dari rasio kebutuhan. Ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota) memang telah mencapai lebih dari 90 persen, namun hal itu belum menjamin kebutuhan bacaan masyarakat di pelosok, mengingat lokasi perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota umumnya terletak di pusat kota.

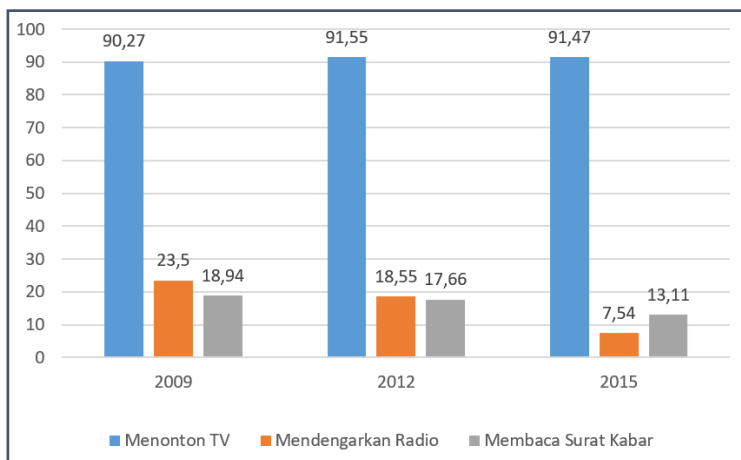
Tabel 1.2. Jumlah Jaringan Toko Buku di Indonesia

No	Jaringan Toko Buku	Jumlah
1.	Gramedia	113
2.	Kharisma	52
3.	Periplus	45
4.	Book & Beyond	38
5.	Gunung Agung	21
6.	Togamas	20
7.	Tisera	15
8.	Paperclip	9

Sumber: Komite Buku Nasional, *History of Publishing in Indonesia*.

Begitu pula keberadaan toko buku juga masih tergolong sedikit dan tidak merata. Jaringan toko buku Gramedia, misalnya, baru sekitar 113 toko, sementara jaringan toko buku lainnya jauh lebih sedikit lagi jumlahnya (lihat Tabel 1.2.). Toko-toko buku tersebut umumnya juga terletak di kota besar atau setidaknya di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, sehingga akses masyarakat di pelosok tidak terwadahi.

Ketiga, rendahnya akses masyarakat terhadap bacaan terkonfirmasi dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai persentase penduduk di atas 10 tahun yang mengakses media, terutama apabila membandingkan antara meningkatnya akses masyarakat terhadap televisi yang berbanding terbalik dengan akses masyarakat terhadap surat kabar/majalah. Persentase penduduk Indonesia yang menonton televisi pada 2009 – 2015 mencapai lebih dari 90 persen, sementara penduduk yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar cenderung menurun. Pada 2009, pendengar radio sekitar 23,50 persen menjadi 7,5 persen di tahun 2015. Sedangkan pembaca surat kabar sekitar 18,94 persen di tahun 2009, menjadi 13,11 persen di tahun 2015 (*Statistik Sosial Budaya 2015*).



Grafik 1.1. Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Media.

Sumber: *Statistik Sosial Budaya 2015*.

Tiga parameter di atas, yaitu (1) minimnya akses di sekolah, (2) minimnya akses di masyarakat, serta (3) rendahnya perilaku membaca dibandingkan dengan mengakses media lainnya, menunjukkan kendala yang melatari persoalan literasi masyarakat Indonesia yang sedang dihadapi oleh GLN. Upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa memahami peta persoalan literasi tersebut. Di samping itu, tanpa memahami peta persoalan itu, maka capaian hasil program GLN juga sulit diukur. Sebagai contoh, buku Panduan Gerakan Literasi Nasional 2017 dan Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional 2017 yang diterbitkan oleh Kemdikbud tidak menyajikan telaah mengenai kondisi, jumlah, dan persebaran perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum di seluruh Indonesia. Padahal data mengenai jumlah, kondisi, dan persebaran perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum merupakan salah satu indikator tersedianya akses terhadap bahan-bahan literasi bagi siswa dan masyarakat. Tersedianya akses merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan aktivitas literasi dapat dilakukan (Miller dan McKenna, 2016).

Jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum tentu hanya satu dari sekian indikator lain yang dapat menggambarkan keberhasilan upaya peningkatan literasi masyarakat. Terdapat indikator-indikator lain yang juga perlu ditelaah agar dapat memberikan gambaran persoalan yang lebih utuh agar program GLN dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Berkaca dari kebutuhan itu, maka perlu suatu penelitian untuk dapat menyusun indeks aktivitas literasi yang dapat menggambarkan kondisi aktivitas literasi masyarakat Indonesia dengan menetapkan dimensi dan indikator-indikator yang terukur. Melalui dimensi dan indikator yang terukur, diharapkan dapat disusun angka indeks yang dapat memberikan gambaran aktivitas literasi masyarakat sampai di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Dengan begitu, indeks tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan dan evaluasi program GLN baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.2. Tujuan, Keluaran, dan Manfaat

Sejak dicanangkan pada 2015, program GLN telah mampu mendorong praktik literasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Namun, gambaran kondisi literasi masyarakat tidak dapat diketahui secara pasti. Selama ini tingkat literasi masyarakat Indonesia umumnya digambarkan melalui survei yang dilakukan oleh lembaga internasional, seperti rilis hasil PISA maupun survei yang dilakukan oleh Central Connecticut State University di bawah tajuk *The Most Literate Nations*.

Di tingkat pemerintah, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga telah mengembangkan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) atau *Indonesia National Assessment Programme* (INAP) yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat literasi siswa. Namun, survei tersebut terutama ditujukan hanya kepada siswa di sekolah, sehingga gambaran mengenai kondisi literasi masyarakat secara umum belum diketahui secara pasti.

Guna merespon kebutuhan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) dengan mengkaji beberapa hal. *Pertama*, mengkaji dimensi dan indikator apa saja yang dapat menggambarkan aktivitas literasi membaca masyarakat. *Kedua*, mengkaji dan menentukan cara penyusunan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat aktivitas literasi tersebut.

Dengan memecahkan dua persoalan di atas, maka akan diperoleh Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) yang dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat (Kemdikbud) Indeks Alibaca dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi dan merencanakan program literasi yang lebih tepat dan terencana, mengingat sejauh ini perencanaan dan program literasi tidak berpegang pada data empiris (*evidence based*).
2. Bagi pemerintah provinsi, Indeks Alibaca dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat aktivitas literasi masyarakat di

daerah mereka dibandingkan dengan provinsi lain, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang harus mereka dorong agar aktivitas literasi masyarakat dapat meningkat.

3. Bagi kalangan akademisi dan pemerhati isu literasi, Indeks Alibaca dapat menjadi titik tolak guna telaah lebih lanjut mengenai dinamika dan perkembangan literasi masyarakat di Indonesia.
4. Bagi pegiat dan aktivis literasi, indeks ini dapat menjadi pemacu guna mendorong dan mengawal upaya untuk meningkatkan aktivitas literasi di daerah masing-masing.



BAB 2

KONSEP INDEKS ALIBACA

2.1. Batasan Konsep Literasi

Sebelum lebih jauh membahas bagaimana kerangka konseptual yang digunakan dalam indeks ini, perlu dibahas secara singkat mengenai pengertian *literasi* yang digunakan, mengingat istilah literasi telah berkembang begitu luas tidak hanya berkenaan dengan teks atau aktivitas membaca dan menulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan dua makna istilah literasi, yaitu: (1) kemampuan menulis dan membaca; (2) pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Istilah literasi berikut maknanya itu, agaknya merupakan saduran dari bahasa Inggris: *literacy*, yang memiliki arti: (1) *The ability to read and write*; (2) *Competence or knowledge in a specified area*.

Istilah literasi mulai marak digunakan di sekitar abad ke-19, sejalan dengan meluasnya dampak mesin cetak (Revolusi Guttenberg) yang merambah hingga negeri-negeri jajahan (Anderson, 2008). Semula, term literasi merujuk kepada praktik menulis dan membaca yang digunakan untuk membedakan antara mereka yang sudah melek aksara (*literate*) dan yang masih buta huruf (*illiterate*). Namun, istilah ini kemudian berkembang dan dipadankan dengan istilah 'pengetahuan' dan 'keterampilan' dalam berbagai bidang kehidupan. Pemerintah sendiri menyebutkan terdapat enam literasi dasar yang

perlu dimiliki oleh setiap warga negara, yakni literasi baca-tulis-hitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi kewarganegaraan (*Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi VI/Oktober-2016).

Mengingat luasnya spektrum literasi sebagaimana disebutkan di atas, istilah literasi dalam Indeks Alibaca hanya mencakup literasi membaca. Term literasi dalam Indeks Alibaca dibatasi hanya pada aktivitas membaca teks sebagaimana pengertian ‘peristiwa literasi’, yaitu peristiwa atau kegiatan subjek dalam menggunakan teks atau bahan bacaan (Barton dan Hamilton, 2000; Heath dan Street, 2008). Hasil indeks ini dengan demikian hanya menyajikan gambaran mengenai aktivitas literasi membaca masyarakat di suatu wilayah, bukan literasi dalam makna yang lain.

Batasan cakupan ini penting disebutkan mengingat dua hal. *Pertama*, upaya menyusun indeks literasi yang mencakup enam literasi dasar sulit dilakukan mengingat luas dan beragamnya indikator di masing-masing bidang literasi. Dengan membatasi cakupan, maka indikator dan penafsirannya jadi lebih fokus dan terarah. *Kedua*, hasil indeks yang lebih spesifik dapat menjadi tolok ukur bagi para pemangku kepentingan guna mendorong aktivitas literasi membaca di masyarakat.

2.2. Kajian Pustaka

Meningkatnya akses terhadap pendidikan dan upaya pemberantasan buta aksara ternyata tidak lantas mendorong masyarakat memiliki budaya baca. Padahal masyarakat yang memiliki budaya baca (*reading society*) diyakini akan mengantarkan suatu bangsa ke gerbang kemajuan, karena hal itu menandakan tingginya minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memiliki nalar kritis.

Demokrasi yang baik pun memerlukan dukungan masyarakat yang memiliki budaya baca. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pernah menulis: “Demokrasi hanya akan berkembang, apalagi *survive*, di suatu masyarakat yang paraarganya

adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara.” (Daeod Joesoef, 2004).

Pendapat Ignas Kleden (1999) mengenai gagalnya transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat yang sudah ‘melek huruf’ ke masyarakat yang memiliki ‘budaya baca’ patut disimak. Ignas Kleden mengelompokkan masyarakat yang melek huruf menjadi tiga. *Kelompok pertama*, adalah mereka yang memiliki kemampuan membaca sederhana, dinyatakan telah bebas buta aksara, namun karena akses terhadap bahan bacaan rendah dan minimnya keperluan untuk mempraktikkannya, membuat kemampuan itu berkurang atau bahkan hilang. Pada kelompok ini, menurut Kleden, secara teknis telah melek aksara, namun secara fungsional dan budaya masih tergolong buta aksara.

Kelompok kedua, adalah mereka yang secara teknis dan fungsional telah melek aksara. Mereka mampu membaca dan menggunakannya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, namun belum menggunakan kecakapan itu sebagai kebiasaan untuk menambah pengetahuan, hiburan, atau berekspresi melalui tulisan. Pada kelompok ini, secara *budaya* masih dianggap buta aksara.

Kelompok ketiga, adalah mereka yang di samping memiliki kemampuan baca tulis secara teknis dan fungsional, juga menjadikan membaca dan menulis sebagai kebutuhan hidup, kebiasaan, dengan cara membaca dan menuliskan hal-hal yang tidak hanya terbatas pada tugas dan pekerjaan. Pada kelompok yang terakhir ini, mereka telah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki budaya baca (*reading habit*).

Dari pendapat Ignas Kleden di atas, dapat dipahami bahwa capaian angka melek aksara selama ini lebih merujuk kepada melek aksara secara teknis dan fungsional dan belum berhasil membentuk masyarakat yang memiliki budaya baca. Asumsi tersebut perlu diperdalam dengan menelaah kajian-kajian literasi lainnya baik yang secara umum menggambarkan kondisi literasi di masyarakat maupun yang secara khusus menggambarkan kondisi literasi di sekolah.

2.2.1. Kajian Literasi di Masyarakat

Kajian-kajian melalui studi kuantitatif mengenai minat dan kegemaran membaca dapat menjadi perbandingan di sini. *Pertama*, kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (2011) dengan tajuk “Kajian Pembudayaan Kegemaran Membaca”.

Kajian ini dilakukan di sepuluh kota, antara lain Surabaya, Semarang, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Ambon, dan Mataram. Responden di masing-masing kabupaten/kota terbagi ke dalam responden ‘kalangan pendidikan’ dan ‘kalangan umum’. Responden di kalangan pendidikan di tiap kota berjumlah 125 orang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sedangkan responden di kalangan umum berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai di kompleks instansi pemerintah, pegawai di instansi swasta, serta masyarakat umum di pusat keramaian. Jumlah sampel tidak didasarkan pada jumlah dan keragaman populasi, melainkan didasarkan pada kebutuhan analisis.

Hasil analisis dikelompokkan ke dalam dua indeks, yaitu ‘indeks kegemaran membaca’ dan ‘indeks infrastruktur’. Indeks kegemaran membaca diukur dari beberapa indikator, seperti fasilitas media yang dimiliki, pemanfaatan waktu luang, jenis bacaan yang dibaca, waktu yang digunakan untuk membaca, sumber untuk memperoleh bacaan, jumlah koleksi buku pribadi, sampai frekuensi kunjungan ke perpustakaan. Sedangkan pada indeks infrastruktur diukur melalui kondisi dan ongkos yang dikeluarkan warga dalam menggunakan angkutan umum, keberadaan fasilitas sekolah, perpustakaan, taman bacaan, dan toko buku.

Dari sepuluh kota yang dikaji, diperoleh kesimpulan bahwa untuk indeks kegemaran membaca sebagian besar kabupaten/kota yang disurvei sudah masuk kategori ‘cukup baik’, atau berada di atas poin 50%. Hanya di Kota Padang yang masuk kategori kurang baik karena baru mengantongi angka 48,92%. Adapun untuk variabel indeks infrastruktur, dari sepuluh kota yang dikaji sudah dianggap memadai dengan skor rata-rata 85%.

Kedua, survei serupa juga dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2015 namun dengan indikator yang berbeda dan hasil yang

berbeda pula. Publikasi survei ini berjudul “Hasil Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia”. Survei dilakukan di 11 Provinsi (28 Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan representasi daerah untuk menggambarkan kondisi secara nasional.

Dalam survei ini disimpulkan bahwa sebagian besar responden (65%) mengisi waktu luang untuk melakukan aktivitas selain membaca, sementara aktivitas membaca hanya dilakukan oleh 35% responden lainnya. Aktivitas selain membaca yang dominan dilakukan ialah menonton TV (sebanyak 21% responden) dan aktivitas bermain gim atau media sosial melalui telepon pintar, tablet, dan komputer (sebanyak 21% responden).

Responden yang disurvei secara umum melakukan kegiatan membaca rata-rata dalam seminggu hanya sebanyak 2 sampai 4 kali dengan waktu baca kurang dari 2 jam per hari (termasuk dalam kategori rendah). Rendahnya aktivitas membaca juga dapat dilihat dari rata-rata dalam seminggu hanya menyelesaikan bacaan 0 – 100 halaman.

Minat dan kemampuan membeli buku juga rendah, terlihat dari rata-rata responden yang secara umum mengalokasikan dana untuk membeli buku dalam setahun sebesar Rp. 0 s/d Rp.100 ribu dan Rp.101 ribu s/d Rp.200 ribu, termasuk dalam kategori rendah. Koleksi buku juga terbilang kecil, yaitu mayoritas responden hanya memiliki koleksi buku antara 0 s/d 20 buku.

Ketiga, kajian mengenai minat baca juga dilakukan oleh Tim Riset Komite Buku Nasional (2016) dengan judul “Laporan Survey Buku dan Minat Baca: Studi 7 Kota di Indonesia”. Studi ini dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Jakarta dan Surabaya memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 500 dan 300 orang, sedangkan lima kota lainnya berkisar 200 orang. Total jumlah responden ialah 1.855 orang yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu mahasiswa, pegawai swasta, pegawai pemerintah, profesional, dan wiraswasta.

Survei yang dilakukan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepemilikan buku, kunjungan ke perpustakaan, kendala pembelian

buku, jenis buku yang diminati, buku bacaan anak, hingga pengaruh bacaan digital. Secara umum, hasil survei tersebut menunjukkan kepemilikan buku masih rendah. Baik di kalangan mahasiswa, pekerja swasta dan pemerintah, serta kalangan profesional dan wiraswasta, yang umumnya hanya memiliki buku kurang dari 5 judul. Sementara kunjungan ke perpustakaan cukup tinggi di kalangan mahasiswa, sementara di kalangan lainnya rendah.

Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui tim Gerakan Literasi Sekolah juga telah melakukan studi terhadap beberapa kabupaten/kota yang telah menjalankan program literasi berdasarkan program pendampingan dari USAID Prioritas. Studi tersebut dilakukan dalam rangka pemberian Anugerah Literasi Prioritas, di mana kabupaten/kota terpilih dinilai dari lima komponen yang menggambarkan program literasi yang dilaksanakan, antara lain aspek Publikasi dan Sosialisasi, Penguatan Pelaku/Pegiat Literasi, Penyediaan Bahan Bacaan, Penguatan Kelembagaan, dan Pelibatan Publik. Lima komponen tersebut merupakan komponen-komponen untuk menyusun Indeks Pembangunan Literasi. Data untuk penilaian diperoleh dari asesmen yang dilakukan oleh USAID Prioritas.

Melalui penilaian atas lima komponen itu, sepuluh kabupaten/kota dianggap masuk kategori A atau sangat baik, antara lain Kabupaten Serdang Bedagai, Lumajang, Bandung Barat, Sidenreng Rappang, Tasikmalaya, Blitar, Kota Cimahi, Maros, Bireuen, dan Sidoarjo. Adapun skor tertinggi dari kelima komponen yang dinilai diperoleh Kabupaten Serdang Bedagai sehingga kabupaten ini layak mendapatkan peringkat pertama.

2.2.2. Kajian Literasi di Sekolah

Adapun kajian yang fokus menelaah literasi siswa dan program literasi yang dilaksanakan di sekolah dapat dibaca pada beberapa laporan penelitian. *Pertama*, *Early Grade Reading Assessment (EGRA)* yang dilakukan oleh ACDP Indonesia dengan dukungan dana dari USAID. Asesmen ini untuk mengukur secara sistematis seberapa baik siswa di kelas-kelas awal sekolah dasar memiliki keterampilan

membaca. Asesmen pertama dilakukan pada tahun 2012 kepada 4.233 siswa kelas 3 di 184 sekolah yang tersebar di 7 provinsi.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa siswa kelas 3 dapat membaca kata dalam Bahasa Indonesia, namun mereka belum tentu paham apa yang mereka baca. Hanya setengah dari para siswa itu yang mampu memahami tulisan dengan baik, yaitu mereka yang membaca dengan tingkat yang memuaskan (mampu menjawab sedikitnya 4 dari 5 pertanyaan dengan benar).

Asesmen kedua dilakukan pada 2014 terhadap 4.812 siswa kelas 2, menunjukkan bahwa tidak sampai setengah dari jumlah tersebut mahir membaca dan paham apa yang mereka baca. Hanya 26% siswa dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan dengan benar dan 5,8% siswa tidak dapat membaca sama sekali.

Secara khusus, dalam asesmen itu juga terungkap bahwa anak-anak di Jawa dan Bali dapat membaca dan paham atas apa yang mereka baca secara lebih baik dibandingkan anak-anak di daerah lain di Indonesia. Anak-anak dari daerah timur Indonesia membaca dengan tingkat pemahaman paling rendah. Begitu pula, terdapat kesenjangan dalam hal kemampuan membaca yang nyata antara anak-anak di daerah terpencil dengan mereka yang tinggal di daerah non-terpencil.

Kedua, kajian yang dilakukan oleh Nur Berlian dkk (Tim Puslitjak Dikbud) yang terbit tahun 2018 dengan judul “Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah”. Lokasi kajian dilakukan di 4 kabupaten/kota yang dipilih berdasarkan pemetaan hasil INAP/ AKSI dan *monitoring* Gerakan Literasi Sekolah (GLS) secara *online*, yaitu daerah yang dianggap rendah literasinya antara lain Kota Palangkaraya dan Kabupaten Lombok Barat, dan daerah yang dianggap memiliki tingkat literasi tinggi antara lain Kota Padang dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian literasi, pelaksanaan GLS di Sekolah Rujukan dan Sekolah Bukan Rujukan menunjukkan hasil yang berbeda. Pada SD Rujukan rata-rata pelaksanaan GLS mencapai 93 persen, SMP Rujukan sebesar 77

persen, sedangkan di SD dan SMP Bukan Rujukan rata-rata berada di kisaran 60 persen.

Dalam kajian itu juga terungkap bahwa pelaksanaan GLS masih banyak mengalami hambatan terutama berkenaan dengan sumber daya pendukung, seperti kondisi perpustakaan sekolah, ruang baca, dan jumlah buku, terutama buku fiksi dan buku referensi. Faktor lainnya yang ikut menghambat adalah tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi orang tua yang sebagian besar masih rendah, sehingga capaian (*output*) sekolah belum secara konsisten mengalami peningkatan, bahkan di beberapa sekolah mengalami penurunan. Faktor lainnya adalah tingkat kesadaran siswa dan guru yang masih kurang terhadap program literasi, sosialisasi program literasi yang belum maksimal dan menyeluruh, serta masih minimnya dukungan orang tua dan pihak-pihak lainnya.

Ketiga, kajian terhadap infrastruktur literasi di sekolah berkenaan dengan pelaksanaan GLS yang dilakukan oleh K. Laksono dan P. Retnaningdyah (2018). Kajian dengan judul “*Literacy Infrastructure, Access to Books, and the Implementation of the School Literacy Movement in Primary Schools in Indonesia*” ini berusaha melihat implementasi dari Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah terkait dengan sarana perpustakaan yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung bagi terlaksananya GLS, serta Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, di mana salah satu upaya penumbuhan budi pekerti dilakukan melalui pembiasaan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Penelitian mengambil lokus sekolah dasar di Jawa Timur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan mengenai standar sarana telah diterbitkan sejak 2007, banyak sekolah belum memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan. Misalnya, dalam hal jumlah buku pengayaan, hanya 5% sekolah yang diteliti yang memenuhi standar. Meskipun demikian, pelaksanaan GLS di sekolah tetap berjalan, kendati dengan berbagai kekurangan. Sekolah dan guru berupaya kreatif memenuhi bacaan dengan cara mengkliping cerita dari koran, memberdayakan siswa untuk membawa buku cerita ke sekolah, bertukar buku antar-kelas, serta mengundang kehadiran

perpustakaan keliling ke sekolah.

Kendala penyelenggaraan GLS antara lain terletak pada minimnya sarana, yaitu buku bacaan pengayaan bagi siswa, serta kemampuan dan kreativitas guru dalam melaksanakan program ini. Kurangnya perhatian sekolah terhadap pengadaan buku bacaan dipecahkan melalui anjuran agar siswa membawa buku ke sekolah. Namun langkah ini dinilai kurang tepat karena sebagian siswa berasal dari keluarga miskin.

Studi ini juga mengonfirmasi bahwa siswa dari keluarga miskin memiliki akses yang minim terhadap buku baik di rumah maupun di komunitas karena mereka tidak mampu mengakses buku ke perpustakaan umum dan toko buku. Standardisasi perpustakaan sekolah penting dilakukan untuk memberikan akses buku yang baik kepada siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa keberadaan perpustakaan dengan bahan bacaan yang memadai menjadi faktor penting bagi pengembangan dan keberhasilan program GLS.

Berbagai kajian di atas memberikan gambaran mengenai kondisi literasi di masyarakat dan di sekolah yang secara umum dapat dikatakan masih rendah. Rendahnya kondisi literasi masyarakat ditandai oleh minimnya aktivitas membaca buku dibandingkan dengan aktivitas lainnya, rendahnya alokasi waktu dalam membaca buku, kecilnya jumlah koleksi buku, minimnya alokasi dana untuk membeli buku, serta rendahnya kunjungan ke perpustakaan dan toko buku. Adapun kondisi literasi siswa ditandai oleh rendahnya kemampuan membaca dan memahami bacaan, minimnya sarana perpustakaan dan koleksi buku bacaan, kesenjangan penerapan GLS antara sekolah rujukan dan bukan rujukan, serta minimnya dukungan dari pihak eksternal sekolah.

Meskipun mampu memberikan kesimpulan yang cukup memadai, namun kekurangan dari berbagai kajian di atas terletak pada lingkup kajian yang hanya terbatas pada beberapa wilayah atau kabupaten/kota, sehingga belum mampu memberikan gambaran secara nasional. Indikator kajian yang dikembangkan umumnya hanya dapat terpenuhi melalui data primer, sehingga upaya untuk

meluaskan cakupan kajian secara nasional menjadi terkendala. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan model kajian yang dapat memanfaatkan data sekunder dengan mengembangkan indikator-indikator yang terukur sehingga dapat memberikan gambaran secara nasional.

Guna menjawab tantangan tersebut, kajian ini berupaya menyusun gambaran aktivitas literasi membaca di tingkat provinsi dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia, antara lain data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data dari Perpustakaan Nasional, serta data dari komunitas literasi. Dengan menggunakan indikator dari data sekunder, maka upaya untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara berkala karena umumnya data tersebut diperbarui secara periodik.

2.3. Kerangka Konseptual

Persoalan rendahnya budaya baca merupakan salah satu isu penting dalam memahami rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi diyakini akan memiliki tingkat literasi yang tinggi pula. Namun untuk mendorong agar masyarakat memiliki budaya baca tinggi diperlukan beberapa prasyarat.

Fuad Hasan (dalam Sutarno, 2003) mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan 'minat baca' masyarakat harus berpijak dari adanya 'kemampuan membaca'. Kemampuan atau kecakapan membaca (*proficiency*) merupakan syarat awal untuk mengakses bacaan. Setelah memiliki kecakapan membaca, maka langkah selanjutnya ialah membina 'kebiasaan membaca'.

Upaya membina kebiasaan membaca itu tidak dapat terlaksana tanpa tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya. Melalui penjelasan Fuad Hasan tersebut, menjadi jelas bahwa budaya baca tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan memerlukan beberapa komponen, antara lain: (1) kemampuan membaca, (2) tersedianya bahan bacaan, dan (3) pembinaan kebiasaan membaca.

Tanpa satu di antara tiga hal itu tentu upaya membangun budaya baca akan sulit diwujudkan.

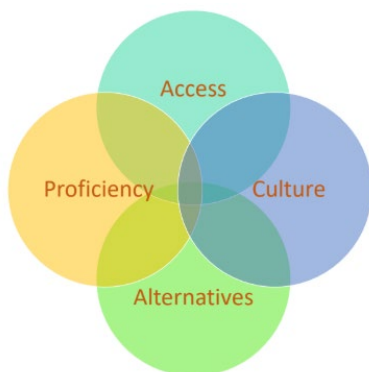


Bagan 2. 1. Menuju Masyarakat Berbudaya Baca.

Sumber: Fuad Hasan dalam Sutarno (2003).

Pendapat Fuad Hasan senada dengan pandangan Miller dan McKenna (2016) mengenai empat faktor yang dapat memengaruhi terjadinya aktivitas literasi. Keempat faktor tersebut antara lain:

1. *Proficiency* atau kecakapan merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses sumber-sumber literasi. Bebas buta aksara, misalnya, merupakan salah satu syarat kecakapan yang harus dimiliki untuk dapat membaca teks-teks tertulis.
2. *Access* merupakan sumber daya pendukung di mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber-sumber literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa.
3. *Alternatives* ialah beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan. ‘Alternatif’ di sini dapat dimaknai sebagai opsi lain yang disediakan oleh perangkat elektronik dan digital dalam mengakses sumber-sumber literasi.
4. *Culture* meliputi gagasan, nilai, norma, dan makna yang dibentuk oleh keluarga, komunitas, dan lingkungan yang lebih luas yang turut memengaruhi perilaku literasi. Dalam hal ini ‘budaya’ dimaknai sebagai upaya membentuk kebiasaan atau habitus literasi.

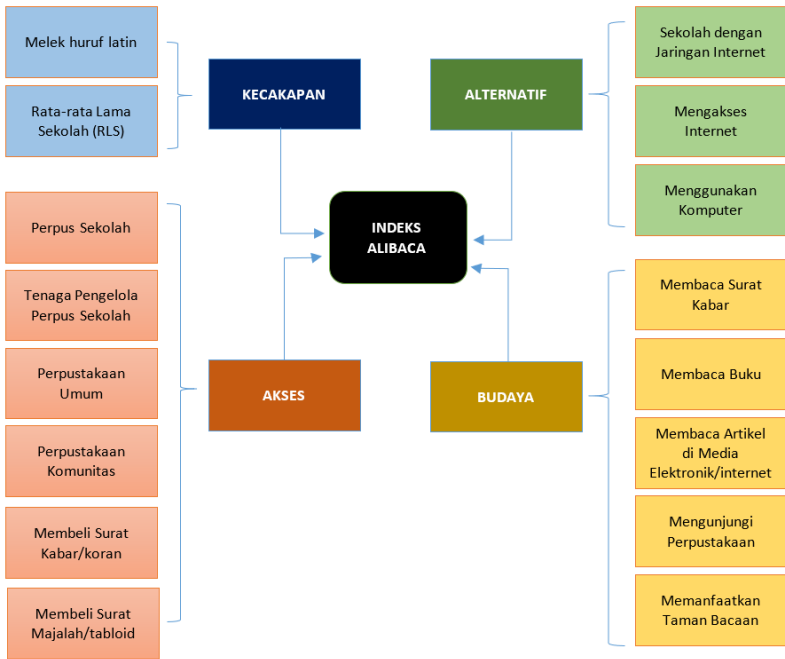


Bagan 2. 2. Interaksi antar-faktor yang memengaruhi aktivitas literasi.

Sumber: Miller dan McKenna (2016).

Empat faktor di atas memiliki peran penting dan saling berkaitan dalam mendukung terjadinya aktivitas literasi, sehingga ketiadaan satu faktor akan memengaruhi fungsi dari faktor lainnya. Kemampuan dan kecakapan membaca misalnya, akan memengaruhi bagaimana akses terhadap bahan bacaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula kecakapan mengakses berbagai alternatif teknologi informasi akan memengaruhi bagaimana penggunaan teknologi tersebut untuk keperluan mengakses informasi.

Mengadopsi kerangka berpikir di atas, maka Indeks Alibaca tersusun dari empat dimensi, antara lain Dimensi Kecakapan (*Proficiency*), Dimensi Akses (*Access*), Dimensi Alternatif (*Alternatives*), dan Dimensi Budaya (*Culture*). Setiap dimensi dianggap sebagai faktor yang secara bersama-sama turut mendukung terjadinya aktivitas literasi membaca. Setelah menentukan keempat dimensi itu, maka langkah selanjutnya ialah menetapkan indikator-indikator yang dapat merepresentasikan setiap dimensi tersebut. Gambaran indikator pada setiap dimensi dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 2. 3. Kerangka Konseptual Indeks Alibaca.

Dimensi Kecakapan merupakan gambaran mengenai tingkat kecakapan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan, antara lain digambarkan melalui dua indikator: (1) Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin, dan (2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25+.

Persentase melek huruf digunakan untuk melihat sejauh mana suatu daerah telah mampu memberantas buta aksara, sehingga masyarakatnya dapat mengakses bahan-bahan literasi. Sedangkan RLS digunakan untuk menilai kesempatan mengakses pendidikan sehingga masyarakat di suatu daerah memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk memanfaatkan informasi dan pengetahuan yang ada. Semakin tinggi bebas buta huruf latin serta semakin lama RLS masyarakat di suatu daerah, maka dianggap semakin baik kondisi

kecakapan literasi masyarakatnya. Namun perlu diimbahi catatan bahwa dua indikator ini tidak serta merta mewakili mutu atau kualitas kecakapan masyarakat, karena untuk membuktikan hal itu perlu instrumen uji seperti yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) yang menyelenggarakan AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia).

Dimensi Akses merupakan gambaran mengenai ketersediaan *sumber daya literasi* baik di sekolah maupun di masyarakat. Sumber daya literasi di sekolah dilihat melalui dua indikator, yaitu (1) Persentase jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik; dan (2) Persentase jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah.

Persentase perpustakaan sekolah ‘dalam kondisi baik’ penting dilihat sebagai salah satu indikator terpenuhinya standar sarana dan prasarana sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah. Sedangkan persentase petugas pengelola perpustakaan sekolah merupakan komponen penting yang dapat mendukung terselenggaranya layanan perpustakaan yang optimal sebagaimana disyaratkan oleh Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Sedangkan akses terhadap sumber daya literasi di masyarakat dilihat melalui tiga indikator, yaitu (1) Ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan perpustakaan desa; (2) Rasio perpustakaan komunitas (Taman Bacaan Masyarakat dan Pustaka Bergerak) per seribu penduduk usia 5 – 24 tahun; (3) Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli surat kabar/koran; (4) dan Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli majalah/tabloid.

Ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan perpustakaan desa diatur oleh UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di setiap jenjang tersebut, idealnya minimal terdapat satu perpustakaan. Rasio perpustakaan komunitas digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan bacaan di sekitar tempat tinggal mereka. Menurut asumsi ideal, setiap 1.000 penduduk seyogiannya

dilayani oleh 1 taman bacaan atau perpustakaan komunitas. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding ialah usia 5 – 24 tahun karena umumnya perpustakaan komunitas melayani penduduk di usia tersebut. Sedangkan indikator rumah tangga yang membeli surat kabar/koran dan/atau majalah/tabloid digunakan untuk melihat sejauh mana rumah tangga di suatu daerah mengakses bahan bacaan cetak untuk keluarga mereka.

Dimensi Alternatif merupakan gambaran mengenai opsi atau kemungkinan yang disediakan oleh perangkat elektronik dan digital dalam mengakses informasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Di sekolah, indikator tersebut dilihat melalui (1) Persentase sekolah yang memiliki jaringan internet; dan di masyarakat dilihat melalui (2) Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir mengakses internet; dan (3) Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir menggunakan komputer. Data mengenai persentase masyarakat yang mengakses internet di sini termasuk mereka yang mengakses media sosial dan aplikasi pesan singkat, seperti Facebook, Twitter, BBM, dan Whatsapp. Sedangkan persentase masyarakat yang menggunakan komputer, termasuk mereka yang menggunakan *personal computer* (PC) atau komputer desktop, komputer *portable* (laptop), serta sejenis komputer genggam (tablet) (*Penjelasan pada publikasi Susenas KOR 2017*).

Jaringan internet di sekolah merupakan gambaran tersedianya alternatif akses terhadap informasi yang dapat dinikmati oleh guru dan siswa, di samping bahan bacaan konvensional yang disediakan oleh perpustakaan sekolah. Sedangkan persentase pengguna komputer dan internet merupakan gambaran alternatif sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi selain sumber-sumber cetak atau melalui perangkat teknologi informasi.

Dimensi Budaya merupakan dimensi yang menggambarkan sejauh mana kebiasaan atau perilaku masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi. Hal ini antara lain tergambar melalui indikator (1) Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam seminggu terakhir yang membaca surat kabar; (2) membaca buku cetak selain kitab suci; (3) membaca artikel/berita yang bersumber dari media elektronik, internet, dan *sofcopy*; (4) Persentase penduduk

berumur 5 tahun ke atas dalam sebulan terakhir yang mengunjungi perpustakaan; dan (5) memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat.

Indikator 1 – 3 pada *dimensi budaya* di atas menggambarkan kebiasaan membaca baik membaca bahan bacaan cetak maupun elektronik selama seminggu terakhir, sedangkan indikator 4 – 5 menunjukkan kebiasaan dalam memanfaatkan bahan pustaka di perpustakaan umum dan perpustakaan komunitas selama sebulan terakhir. Indikator di atas diharapkan dapat memberikan gambaran budaya literasi masyarakat.





PZMKI KOTA PONTIANAK PERPUSTAKAAN "TEPIAN SUNGAI"



BAB 3

METODOLOGI

3.1. Pengertian Indeks

Proses pembangunan selayaknya didasarkan pada data empirik (*evidence based*) di lapangan agar dalam tahap perencanaan, *monitoring*, evaluasi, dan pengambilan keputusan dapat lebih objektif dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, indikator-indikator dalam pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan, seyogianya dapat diukur secara kuantitatif.

Salahsatu alat ukur guna mengetahui keberhasilan pembangunan ialah melalui angka indeks. Indeks sendiri dapat didefinisikan sebagai alat ukur yang dapat memberi petunjuk tentang tingkat atau status suatu gejala sosial yang terdiri dari banyak aspek. Suatu indeks merupakan ukuran sederhana berupa angka-angka, tetapi dapat menggambarkan secara komprehensif dan holistik dari gejala sosial yang diukur karena indeks umumnya disusun dari berbagai indikator terpilih guna mengukur dimensi (aspek) dari suatu gejala sosial.

Angka indeks yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri *SMARTS*, yaitu:

S = *Simple*, sederhana, mudah dipahami.

M = *Meaningful*, bermakna, multi-dimensi.

A = *Attainable*, dapat dicapai, diintervensi.

R = *Repeatable*, dapat diulang dengan mudah.

T = *Timely*, diperoleh cepat ketika diperlukan.

S = *Sensitive*, bila dilakukan intervensi terlihat perubahannya.

Selain itu, ciri indeks yang baik juga dapat mengukur perbedaan antarwaktu dan antarlokasi. Dengan begitu perkembangan atau kemunduran gejala sosial yang diukur dapat diketahui dengan melihat dinamika pada kurun waktu tertentu, atau dalam satu waktu dengan melihat perbedaan antarwilayah atau antarlokasi.

Suatu pengukuran gejala sosial melalui angka indeks tersusun melalui sejumlah indikator. Oleh karena itu, upaya menentukan indikator-indikator yang menyusun indeks tersebut juga tidak kalah penting. Menurut *The Jacksonville Community Council* (1992, dalam Mark Amen dkk. 2011), "*Indicators are a way of seeing the big picture by looking at a small piece of it.*" Dalam pengertian yang lain, indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari suatu pengamatan yang mampu menggambarkan kondisi relatif di suatu wilayah (OECD, 2008). Melalui dua pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa indikator merupakan petunjuk yang mewakili gambaran suatu gejala sosial yang dapat mengalami perkembangan naik atau turun. Indikator menjadi penunjuk arah, apakah naik atau turun, ke atas atau ke bawah, ke depan atau ke belakang, yang bermakna apakah lebih baik atau lebih buruk, atau sama saja.

Sebuah indikator harus realistis dan dapat dimonitor untuk mengetahui keberhasilan suatu program, serta dapat diintervensi untuk meningkatkan dampak suatu program. Indikator yang baik setidaknya memenuhi syarat berikut ini:

- Valid, sah.
- *Reliable*, andal, terpercaya, dan konsisten.
- Sensitif, dapat mendekteksi perubahan kecil.
- Spesifik, yakni untuk menggambarkan permasalahan tertentu.
- *Sustainable*, data tersedia untuk keberlanjutan *monitoring* program.

Indikator tersebut dapat diukur dalam bentuk data absolut, proporsi atau persentase, *rate* atau tingkat, rasio atau perbandingan, serta dapat berupa indeks. Menurut jenisnya, indikator terbagi menjadi dua, yaitu indikator tunggal yang berfungsi untuk mengukur satu aspek (misalnya persentase melek huruf, rata-rata lama sekolah), dan indikator komposit yang berfungsi mengukur dari berbagai aspek yang tersusun dari indikator-indikator tunggal yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi satu indeks tunggal (misalnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi Indonesia).

3.2. Pemerian Dimensi dan Indikator

Indeks Alibaca merupakan indeks komposit yang disusun dari empat dimensi yang di dalamnya terdapat 16 indikator. Keempat dimensi tersebut, antara lain *Dimensi Kecakapan*, *Dimensi Akses*, *Dimensi Alternatif*, dan *Dimensi Budaya*. Indikator dari tiap dimensi diperoleh melalui data sekunder yang secara berkala dapat diperbarui, sehingga dapat diulang untuk melihat perkembangan kemajuan di tiap dimensi yang diukur.

Dalam proses penyusunan indikator tersebut, tim peneliti berusaha mempertimbangkan parameter yang merepresentasikan akses terhadap sumber-sumber literasi konvensional (berupa barang cetakan) maupun sumber-sumber literasi yang sifatnya elektronik atau yang diakses melalui media teknologi informasi. Dua sumber bahan literasi tersebut dianggap saling melengkapi. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat pemerian dimensi, indikator, serta sumber datanya.

Tabel 3.1. Pemerian Dimensi dan Indikator

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
D1	Dimensi Kecakapan			
X1	Melek Huruf Latin	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat baca-tulis huruf latin	<i>Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017</i> , BPS.	2017
X2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25+	<i>Indeks Pembangunan Manusia 2017</i> , BPS.	2017
D2	Dimensi Akses			
D2.1	Akses di Sekolah			
X3	Perpustakaan Sekolah	Persentase perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
X4	Petugas Pengelola Perpus Sekolah	Persentase petugas pengelola perpustakaan sekolah	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
D2.2	Akses di Masyarakat			
X5	Perpustakaan Umum	Persentase perpustakaan umum tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan perpustakaan desa	Data Perpustakaan Nasional	2017
X6	Perpustakaan Komunitas (TBM dan Pustaka Bergerak) Per Seribu Penduduk	Rasio perpustakaan komunitas (TBM dan Pustaka Bergerak) per seribu penduduk	Forum Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak Indonesia	Per Agustus 2018
X7	Membeli Surat Kabar	Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli surat kabar/koran	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
X8	Membeli Surat Majalah/Tabloid	Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli majalah/tabloid	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
D3	Dimensi Alternatif			
X9	Sekolah Memiliki Akses Internet	Persentase sekolah yang memiliki jaringan akses internet	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
X10	Mengakses Internet	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengakses internet (termasuk <i>browsing</i> , facebook, twitter, BBM, Whats app dan sejenisnya)	Diolah dari data mentah Susenas Kor, BPS.	2017
X11	Menggunakan Komputer	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan komputer (termasuk <i>PC/Desktop</i> , laptop/ <i>notebook</i> , tablet)	Diolah dari data mentah Susenas Kor, BPS.	2017
D4	Dimensi Budaya			
X12	Membaca Surat Kabar	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir membaca surat kabar, koran, atau majalah cetak	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X13	Membaca Buku Cetak	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam seminggu terakhir membaca buku cetak selain kitab suci	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
X14	Membaca artikel atau berita dari media elektronik	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam seminggu terakhir membaca artikel/berita dari media elektronik, internet, <i>softcopy</i>	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X15	Mengunjungi Perpustakaan	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam sebulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X16	Memanfaatkan Taman Bacaan	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam sebulan terakhir pernah memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

3.3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, proses pengumpulan data dalam penyusunan Indeks Alibaca dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber sekunder (*desk study*) guna menelaah dan memetakan data apa saja yang dapat digunakan untuk mendukung indikator pada dimensi indeks yang telah ditetapkan. Data sekunder tersebut antara lain berasal dari publikasi maupun data mentah (*raw data*) dari BPS, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data jumlah perpustakaan umum dari Perpustakaan Nasional, serta data jumlah perpustakaan komunitas dari Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) dan Pustaka Bergerak Indonesia (PBI).

Data BPS yang digunakan ialah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) *core* atau biasa dikenal sebagai Susenas Kor yang

rutin dilakukan setiap tahun dan Susenas MSBP (Modul Sosial Budaya Pendidikan) yang dilakukan tiap tiga tahun sekali. Selain itu, data juga diperoleh dari beberapa publikasi BPS, antara lain buku *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017* dan *Indeks Pembangunan Manusia 2017*.

Dari data mentah Susenas KOR tahun 2017, Susenas MSBP tahun 2015, serta publikasi BPS diperoleh beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendukung Indeks Alibaca, antara lain persentase penduduk yang telah melek huruf latin, rata-rata lama sekolah, persentase penduduk yang membeli surat kabar, pengguna komputer, pengakses internet, penduduk yang membaca surat kabar, membaca buku cetak, membaca artikel dari media elektronik, serta penduduk yang mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan taman bacaan.

Selain data dari dua Susenas di atas, data BPS lainnya yang digunakan ialah publikasi *Provinsi Dalam Angka 2018* (terdapat 34 publikasi sesuai dengan jumlah provinsi), serta publikasi *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Dua jenis publikasi ini diperlukan untuk mendapatkan data jumlah penduduk 5 – 24 tahun yang merupakan data pembanding untuk menghitung keberadaan perpustakaan komunitas per 1.000 penduduk.

Khusus data dari Susenas MSBP digunakan data tahun 2015 karena data terbaru dari survei tahun 2018 belum bisa diakses. Selain itu, data pada Susenas MSBP analisisnya hanya sampai di tingkat provinsi. Hal itu karena Susenas MSBP hanya menasar responden sejumlah 75.000 rumah tangga (bandingkan dengan Susenas KOR yang menggunakan 300.000 Rumah Tangga sebagai responden sehingga mampu memberikan gambaran kondisi sampai tingkat kabupaten/kota). Keterbatasan data sekunder Susenas MSBP ini pula yang menyebabkan Indeks Alibaca hanya mampu menyediakan analisis sampai tingkat provinsi, karena untuk menurunkannya sampai di level kabupaten/kota diperlukan waktu analisis lebih lama dengan menggunakan metode *Small Area Estimation* (SAE).

Data Dapodik digunakan untuk mendukung beberapa indikator, seperti perpustakaan sekolah dalam kondisi baik, petugas pengelola

perpustakaan sekolah, sekolah yang telah memiliki jaringan internet, serta jumlah sekolah secara keseluruhan sebagai pembanding. Sementara data dari FTBM dan PBI digunakan untuk menyusun indikator perpustakaan komunitas, yaitu taman bacaan masyarakat (TBM) dan Pustaka Bergerak.

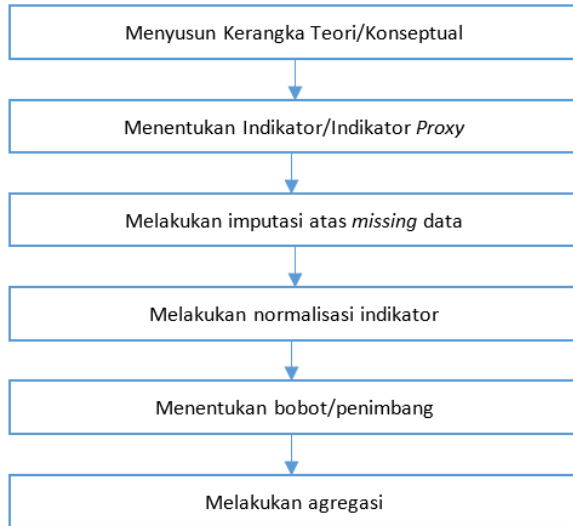
Data sekunder yang digunakan dalam indeks ini terentang mulai dari tahun 2015 sampai 2018 karena ketersediaan data hanya memungkinkan di tahun-tahun tersebut. Data dari Susenas MSBP hanya bisa diakses di tahun 2015, karena data terbaru hasil survei tahun 2018 baru bisa diakses pada 2019. Data Susenas KOR dari BPS dan data dari Dapodik digunakan data tahun 2017. Sedangkan data dari komunitas literasi digunakan data tahun 2018 (per Agustus 2018), karena ketersediaan data hanya memungkinkan diambil di tahun tersebut.

Kedua, selain melakukan kajian pustaka dan telaah terhadap data sekunder, kajian ini juga berupaya melakukan studi kasus terhadap beberapa kota untuk melihat bagaimana peran perpustakaan daerah kabupaten/kota, perpustakaan sekolah, serta perpustakaan komunitas berperan dalam menyediakan akses bacaan serta mendukung program Gerakan Literasi Nasional. Pendekatan studi kasus merupakan upaya penelitian mendalam terhadap suatu lingkup tertentu berdasarkan ruang dan waktu, seperti aktivitas, peristiwa, proses, atau individu tertentu, yang dilakukan dengan pengumpulan data yang luas (Creswell, 2015). Pendekatan studi kasus dianggap tepat karena dapat menjelaskan dan mengilustrasikan secara terperinci kasus-kasus yang dianggap unik. Dalam kajian ini, studi kasus memberikan gambaran perihal praktik-praktik penyelenggaraan fasilitas literasi publik di beberapa kota yang telah dilaksanakan dengan baik. Harapannya, praktik baik tersebut dapat menjadi preseden bagi upaya serupa di daerah-daerah lain.

3.4. Proses Penyusunan Indeks

Kerangka konseptual dan penentuan indikator telah disampaikan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diketengahkan proses imputasi data, normalisasi, penentuan

bobot/penimbang, serta tahap akhir dalam agregasi data sehingga memperoleh angka indeks. Proses penyusunan indeks dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut ini (OECD, 2008):



Data kuantitatif yang diperoleh dari beragam sumber dinormalisasi dengan menetapkan batas angka minimum dan maksimum pada setiap indikator, serta menetapkan bobot di tiap dimensi dan indikator. Penentuan batas minimum dan maksimum dilakukan dengan cara menentukan standar atau ukuran ideal melalui sumber pustaka yang tersedia (termasuk aturan kebijakan dan hasil riset yang relevan), maupun melalui pertimbangan ahli. Sedangkan bobot dimensi dan indikator dibagi rata sesuai jumlah dimensi dan indikator dengan pertimbangan bahwa setiap indikator memiliki peran yang relatif sama dalam mendorong terjadinya aktivitas literasi. Berikut pemerian batas angka minimum dan maksimum, serta bobot pada indikator yang digunakan.

Tabel 3. 2. Batas Minimum dan Maksimum

No	Indikator	Arah	Batas Min	Batas Max	Dasar Penentuan	Bobot
D1	Dimensi Kecakapan					0,25
X1	Melek Huruf Latin	Positif (+)	0	100	Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara	0,50
X2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Positif (+)	0	15	Indeks Pembangunan Manusia.	0,50
D2	Dimensi Akses					0,25
D2.1	Akses di Sekolah					0,50
X3	Perpustakaan Sekolah dalam Kondisi Baik	Positif (+)	0	100	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.	0,50
X4	Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah	Positif (+)	0	100	Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.	0,50
D2.2	Akses di Masyarakat					0,50
X5	Perpustakaan Umum	Positif (+)	0	100	UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.	0,25
X6	Rasio Perpustakaan Komunitas (TBM dan Pustaka Bergerak) Per Seribu Penduduk	Positif (+)	0	184,54	Pendekatan dari nilai maksimum data ditambah dua kali standar deviasi.	0,25

No	Indikator	Arah	Batas Min	Batas Max	Dasar Penentuan	Bobot
X7	Membeli Surat Kabar/Koran	Positif (+)	0	30	Pada 2017 tingkat penetrasi media cetak secara nasional hanya sebesar 20% (AC Nielsen). ¹	0,25
X8	Membeli Majalah/Tabloid	Positif (+)	0	20	Pada 2017 tingkat penetrasi media cetak secara nasional hanya sebesar 20% (AC Nielsen). ¹	0,25
D3	Dimensi Alternatif					0,25
X9	Sekolah Memiliki Akses Internet	Positif (+)	0	100	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.	0,33
X10	Mengakses Internet	Positif (+)	0	80	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 2017, sebanyak 54,7% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet (APJII).² • Jaringan internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. 	0,33
X11	Menggunakan Komputer	Positif (+)	0	50	Kecenderungan penggunaan gawai untuk menggantikan fungsi komputer.	0,33
D4	Dimensi Budaya					0,25
X12	Membaca Surat Kabar, Koran, atau Majalah Cetak	Positif (+)	0	30	Masyarakat cenderung beralih ke media elektronik dan digital. Tingkat penetrasi media cetak hanya sebesar 20% (AC Nielsen). ¹	0,20

No	Indikator	Arah	Batas Min	Batas Max	Dasar Penentuan	Bobot
X13	Membaca Buku Cetak Selain Kitab Suci	Positif (+)	0	60	Kecenderungan masyarakat pembaca di Indonesia masih lebih memilih buku cetak dibanding buku digital (IKAPI). ³	0,20
X14	Membaca Artikel/Berita dari Media Elektronik, Internet	Positif (+)	0	80	Pada 2017, sebanyak 54,7% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet (APJII). ²	0,20
X15	Mengunjungi Perpustakaan	Positif (+)	0	50	Layanan perpustakaan umum belum merata di semua daerah (LAKIP Perpusnas 2016).	0,20
X16	Memanfaatkan Taman Bacaan	Positif (+)	0	50	Layanan taman bacaan belum menjangkau semua daerah (FTBM dan Pustaka Bergerak).	0,20

Sumber rujukan:

1. “Nielsen: Pembaca Media Digital Sudah Lampau Media Cetak”, sumber: <https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampau-media-cetak>
2. “Survei APJII: Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa,” dalam Buletin APJII Edisi 22 – Maret 2018.
3. “Masyarakat Masih Memilih Buku Fisik daripada e-Book”, sumber: <https://tirto.id/masyarakat-masih-memilih-buku-fisik-daripada-e-book-cnsn>

Penentuan batas angka minimum dan maksimum pada masing-masing indikator di atas dilakukan dengan merujuk kepada aturan kebijakan yang ada, kondisi faktual menurut survei atau kajian terkait, serta kesepakatan yang terbangun dalam diskusi tim penyusun dan ahli. Indikator tertentu menggunakan ketentuan standar resmi

apabila tersedia, misalnya rata-rata lama sekolah memakai standar yang digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator *Melek Huruf Latin* ialah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf latin. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 100 dengan dasar penentuan Inpres (Instruksi Presiden) No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Batas maksimum 100 menggambarkan harapan ideal agar seluruh penduduk Indonesia nantinya akan bebas buta aksara. Data Melek Huruf Latin diperoleh dari publikasi BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*.

Indikator *Rata-rata Lama Sekolah* (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah merujuk kepada kesepakatan UNDP, di mana digunakan batas minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Data tersebut diperoleh dari publikasi BPS, *Indeks Pembangunan Manusia 2017*.

Indikator *Perpustakaan Sekolah dalam Kondisi Baik* menggambarkan persentase sekolah yang telah memiliki perpustakaan “dalam kondisi baik”. Kondisi dan keberadaan perpustakaan ini merujuk kepada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 100, di mana semua sekolah lintas jenjang diharapkan memiliki perpustakaan dalam kondisi baik. Data pada indikator ini diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemdikbud.

Indikator *Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah* menggambarkan persentase sekolah yang telah memiliki petugas pengelola perpustakaan sekolah sebagaimana diamanatkan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 100, di mana setiap sekolah idealnya memiliki petugas pengelola perpustakaan sesuai dengan

standar yang ditetapkan Permendiknas No. 25 Tahun 2008. Data pada indikator ini diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemdikbud.

Indikator *Perpustakaan Umum* merujuk kepada amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyiratkan bahwa di setiap jenjang pemerintahan (wilayah administratif), mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan idealnya memiliki minimal 1 perpustakaan pada setiap jenjang tersebut (lihat Pasal 16 tentang Penyelenggara Perpustakaan dan Pasal 22 ayat (1) tentang Perpustakaan Umum). Merujuk pada aturan itu, maka ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 100, artinya di setiap jenjang pemerintahan idealnya terdapat 1 perpustakaan umum. Data jumlah perpustakaan umum diperoleh dari Perpustakaan Nasional.

Indikator *Rasio Perpustakaan Komunitas Per Seribu Penduduk* merupakan rasio perpustakaan komunitas (taman bacaan dan pustaka bergerak) terhadap setiap 1.000 penduduk. Jumlah penduduk sebagai pembanding dipilih di rentang usia 5 – 24 tahun dengan pertimbangan bahwa taman bacaan atau perpustakaan komunitas lazimnya melayani masyarakat di rentang usia tersebut. Menurut asumsi ideal, setiap 1.000 penduduk dilayani oleh satu perpustakaan komunitas. Sebagaimana indikator yang lain, untuk normalisasi data ditentukan terlebih dahulu batas minimum dan batas maksimum data. Batas minimum dalam indikator ini adalah 0, sementara penentuan batas maksimum dilakukan dengan pendekatan dari nilai maksimum data seluruh provinsi ditambah dua kali standar deviasi.

Langkah untuk menentukan standar deviasi dilakukan dengan rumus berikut:

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Rumus di atas menghasilkan nilai standar deviasi 24,84. Penentuan batas maksimum (X_{max}) menggunakan pendekatan nilai maksimum data ditambah dua kali standar deviasi, sehingga digunakan rumus sebagai berikut:

$$X_{max} = n_{max} + (2 \times S)$$

$$X_{max} = 134,85 + (2 \times 24,84)$$

Perhitungan di atas menghasilkan batas maksimum (X_{max}) sebesar 184,54. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum data setelah dipersentase terhadap 1.000 penduduk ialah 134,85, sedangkan standar deviasinya ialah 24,84. Dengan pendekatan nilai maksimum data ditambah dua kali standar deviasi, maka diperoleh batas maksimum 184,54.

Data perpustakaan komunitas diperoleh dari Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) dan Pustaka Bergerak Indonesia yang terdata di situs PT Pos Indonesia dalam program pustaka bebas bea (*free cargo literacy*). Sementara data pembandingan jumlah penduduk usia 5 – 24 tahun diperoleh dari publikasi BPS, yaitu *Provinsi Dalam Angka 2018* (terdapat 34 publikasi sesuai dengan jumlah provinsi), serta publikasi *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*.

Indikator *Membeli Surat Kabar/Koran* merupakan persentase rumah tangga yang dalam sebulan terakhir yang membeli surat kabar/koran. Batas minimum pada indikator ini ditetapkan 0 dan maksimum 30 dengan pertimbangan survei AC Nielsen mengenai jumlah penetrasi media cetak pada tahun 2017 hanya sebesar 20% secara nasional. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Membeli Majalah/Tabloid* merupakan persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli majalah/tabloid. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 20 dengan mempertimbangkan jumlah pembelian majalah yang lebih kecil dibandingkan dengan pembelian surat kabar/koran. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Sekolah Memiliki Akses Internet* menggambarkan persentase sekolah yang telah memiliki jaringan internet. Keberadaan jaringan internet bagi sekolah merujuk kepada Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 100. Artinya, ke

depan diharapkan seluruh sekolah memiliki jaringan internet untuk menunjang pembelajaran dan akses terhadap informasi. Data pada indikator ini diperoleh dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemdikbud.

Indikator *Mengakses Internet* merupakan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengakses internet (termasuk *browsing, facebook, twitter, BBM, Whatsapp* dan sejenisnya). Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 80, dengan harapan ke depan 80% penduduk Indonesia dapat memanfaatkan jaringan internet sebagai sumber Informasi. Penentuan batas maksimum didasarkan pada survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebutkan bahwa 54,7% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Namun di sisi lain, jaringan internet belum seluruhnya merata di seluruh Indonesia. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas Kor 2017.

Indikator *Menggunakan Komputer* merupakan persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan komputer (termasuk *personal computer/desktop, laptop/notebook, tablet*). Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 50 dengan pertimbangan terdapat kecenderungan masyarakat menggunakan gawai untuk menggantikan sebagian fungsi komputer, di samping daya beli masyarakat terhadap komputer masih cukup rendah. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas Kor 2017.

Indikator *Membaca Surat Kabar, Koran, atau Majalah Cetak* merupakan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir membaca surat kabar, koran, atau majalah cetak. Batas minimum pada indikator ini ditetapkan 0 dan maksimum 30 dengan pertimbangan kecenderungan masyarakat yang mulai beralih ke media elektronik dan digital, di samping data mengenai penetrasi media cetak yang hanya 20% secara nasional (AC Nielsen). Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Membaca Buku Cetak* ialah persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir membaca

buku cetak selain kitab suci. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 60 dengan justifikasi kecenderungan masyarakat pembaca di Indonesia yang masih lebih memilih buku cetak dibanding buku digital (IKAPI). Peran buku cetak dianggap masih cukup dominan dalam memberikan informasi dan pengetahuan. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Membaca Artikel atau Berita dari Media Elektronik* merupakan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir membaca artikel/berita dari media elektronik, internet, dan *sofcopy*. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 80 dengan mempertimbangkan hasil survei APJII yang menyebutkan bahwa pada 2017 sebanyak 54,7% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet (APJII). Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Mengunjungi Perpustakaan* ialah persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam sebulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 50 dengan mempertimbangkan bahwa di satu sisi layanan perpustakaan umum belum merata di semua daerah (LAKIP Perpunas 2016), serta adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa perpustakaan tidak lagi dipersepsi sebagai satu-satunya sumber memperoleh informasi/bacaan. Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Indikator *Memanfaatkan Taman Bacaan* merupakan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dalam sebulan terakhir pernah memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat. Pada indikator ini ditetapkan batas minimum 0 dan maksimum 50 dengan mempertimbangkan layanan taman bacaan (dan perpustakaan komunitas) belum sepenuhnya menjangkau semua daerah di Indonesia (data FTBM dan Pustaka Bergerak). Data pada indikator ini diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Setelah menetapkan batas minimum dan maksimum pada setiap indikator, maka proses normalisasi dapat dilakukan. Normalisasi data ialah proses untuk menstandarisasikan data sehingga

selanjutnya dapat diproses dalam penghitungan indeks. Oleh karena setiap indikator yang digunakan dalam indeks ini memiliki angka yang bermakna positif (+), artinya apabila angkanya bertambah maka berarti kondisinya lebih baik, maka digunakan rumus normalisasi sebagai berikut:

$$I_{norm} = \frac{X_a - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Berdasarkan rumus di atas, proses normalisasi **dapat mengubah** atau **tidak mengubah** nilai data awal dari indikator. Normalisasi *tidak mengubah* nilai data awal indikator jika data awal indikator berupa persentase dan rentang antara batas minimum (Xmin) dan batas maximum (Xmax) adalah 0 - 100. Misalnya dalam proses normalisasi indikator *Penduduk Melek Aksara Latin* untuk Provinsi Aceh yang data awal indikatornya adalah 98,47 dengan Xmin = 0 dan Xmax = 100, maka proses penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Normalisasi melek huruf latin Provinsi Aceh} = \frac{98,47 - 0}{100 - 0} \times 100 = 98,47$$

Sebaliknya, normalisasi dapat mengubah nilai awal data indikator apabila (1) data awal indikator tidak berupa persentase, atau (2) data awal indikator berupa persentase namun rentang antara batas minimum (Xmin) dan batas maksimum (Xmax) bukan 0 - 100. Contoh untuk kasus yang *pertama* adalah proses normalisasi indikator *rata-rata lama sekolah* untuk Provinsi Aceh, yang ditentukan nilai awal indikatornya adalah 8,98 dengan Xmin = 0 dan Xmax = 15, maka proses penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Normalisasi melek huruf latin Provinsi Aceh} = \frac{8,98 - 0}{15 - 0} \times 100 = 59,87$$

Kemudian, contoh kasus *kedua* adalah proses normalisasi indikator *Persentase Penduduk 5 Tahun Ke Atas yang Dalam Seminggu Terakhir Membaca Surat Kabar/Koran atau Majalah Cetak* untuk Provinsi Aceh yang nilai awal indikatornya adalah 22,13 dengan Xmin = 0 dan Xmax = 30, maka proses penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Normalisasi membaca surat kabar Prov. Aceh} = \frac{22,13 - 0}{30 - 0} \times 100 = 73,77$$

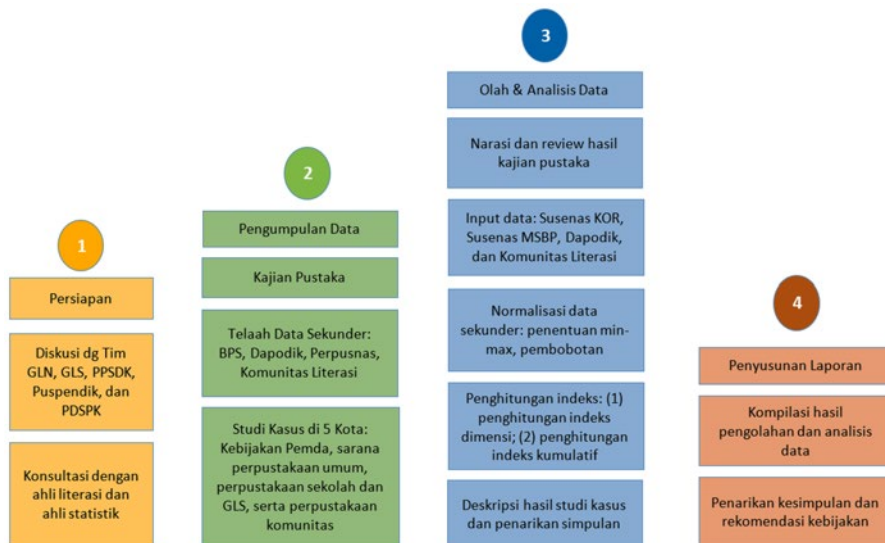
Tiga contoh hasil normalisasi di atas menunjukkan bahwa proses normalisasi dapat mengubah atau tidak mengubah nilai dari data awal. Data awal tidak berubah apabila data tersebut merupakan persentase dan $X_{min} = 0$ dan $X_{max} = 100$. Sedangkan perubahan nilai dapat terjadi apabila data awal indikator tidak berupa persentase atau data awal berupa persentase namun rentang antara batas minimum (X_{min}) dan batas maksimum (X_{max}) bukan 0 - 100.

Setelah melakukan proses normalisasi pada data, tahap selanjutnya ialah menentukan bobot di masing-masing indikator dan dimensi. Dari keempat dimensi yang ada, setiap dimensi diberikan bobot yang sama (0,25), karena masing-masing dimensi tersebut dianggap secara bersama-sama turut memengaruhi terjadinya aktivitas literasi. Begitu pula indikator-indikator yang menyusun setiap indeks diberikan bobot yang sama sesuai dengan jumlah indikator di setiap dimensi (bobot indikator dibagi rata pada tiap dimensi).

Tahap berikutnya ialah penghitungan indeks yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu (1) penghitungan indikator komposit untuk menghasilkan indeks pada tiap dimensi; dan (2) penghitungan indeks aktivitas literasi membaca (agregat). Penghitungan bertahap ini dilakukan untuk mengetahui indeks di masing-masing dimensi, sehingga dapat dipahami nilai di masing-masing dimensi yang nantinya turut membentuk indeks aktivitas literasi membaca di tingkat provinsi.

Rumus penghitungan Indeks Alibaca mengadopsi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah disempurnakan, yaitu menggunakan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik berguna untuk melihat capaian masing-masing dimensi yang turut membentuk hasil akhir suatu indeks. Hal ini berbeda dengan rata-rata aritmatik yang sebelumnya juga digunakan untuk menghitung IPM, namun dianggap kurang sesuai karena aspek yang memiliki capaian kurang baik akan tertutupi oleh aspek lain. Dengan rata-rata geometrik, maka nilai di masing-masing dimensi yang menyumbang bagi indeks secara keseluruhan dapat diketahui, sehingga bermanfaat untuk upaya intervensi. Rumus rata-rata geometrik yang dimaksud ialah sebagai berikut:

$$Indeks Alibaca = \sqrt[4]{I_{kecakapan} \times I_{akses} \times I_{alternatif} \times I_{budaya}}$$



Bagan 3. 1. Tahapan Proses Penyusunan Indeks Alibaca

3.5. Kategori Tingkat Aktivitas Literasi

Gambaran mengenai tingkat aktivitas literasi di tiap provinsi tergambarkan melalui skala dari 0 – 100, di mana angka 0 menunjukkan tingkat aktivitas literasi terendah, sementara angka 100 menunjukkan aktivitas literasi tertinggi. Angka indeks dari rentang 0 – 100 tersebut tersusun dari empat dimensi, di mana setiap dimensi tersusun dari berbagai indikator. Untuk analisis lebih lanjut, maka angka indeks dari skala 0 – 100 dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu:

1. angka indeks 0 - 20,00 merupakan kategori *sangat rendah*;
2. angka indeks 20,01 – 40,00 merupakan kategori *rendah*;
3. angka indeks 40,01 – 60,00 merupakan kategori *sedang*;

4. angka indeks 60,01 – 80,00 merupakan kategori *tinggi*; dan
5. angka indeks 80,01 – 100,00 merupakan kategori *sangat tinggi*.

Pada grafik digunakan warna pembeda untuk memudahkan mengidentifikasi kategori tersebut ke dalam 4 warna, yaitu:

0 - 20,00	Sangat rendah
20,01 - 40,00	Rendah
40,01 - 60,00	Sedang
60,01 - 80,00	Tinggi
80,01 - 100,00	Sangat tinggi

3.6. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana jamaknya suatu penelitian pasti memiliki keterbatasan (limitasi) baik yang sifatnya metodologis maupun keterbatasan dalam proses pelaksanaannya. Pun demikian dalam proses penyusunan indeks ini, tidak luput dari berbagai keterbatasan itu. Keterbatasan dalam Indeks Alibaca, antara lain:

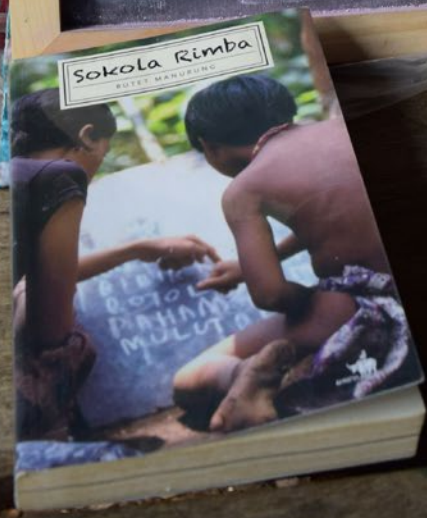
1. Penggunaan data sekunder yang menjadi sumber data utama dalam penyusunan indeks ini memberikan kemudahan karena tim peneliti tidak perlu mendapatkan data primer di lapangan (data yang diperlukan telah dikumpulkan oleh lembaga lain). Namun, apabila terjadi ketidak-akuratan pada data sekunder tersebut, maka hal itu tidak dapat diantisipasi dan di luar wewenang penelitian ini.
2. Penelitian ini semula dimaksudkan untuk menyusun indeks di tingkat kabupaten/kota, namun karena keterbatasan data pada beberapa indikator yang hanya tersedia di tingkat provinsi, maka sementara ini hasil analisis hanya dapat dilakukan sampai di tingkat provinsi. Ke depan, upaya menyusun indeks sampai tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan dengan bantuan metode *Small Area Estimation* (SAE).
3. Penggunaan data sekunder memungkinkan kajian ini

dapat menjangkau lingkup nasional dengan tingkat analisis sampai provinsi. Namun tidak seluruh indikator yang diperlukan tersedia datanya, sehingga indikator yang diajukan dalam indeks ini masih bersifat terbatas. Contohnya, untuk memberikan gambaran mengenai perilaku literasi baik di masyarakat maupun di sekolah, tidak tersedia data mengenai jumlah koleksi perpustakaan, rekap pengunjung, serta rekap peminjaman buku. Data tersebut sebetulnya akan sangat berguna untuk menangkap kesan apakah sarana literasi di masyarakat dan di sekolah difungsikan dengan semestinya. Selain itu, data mengenai 'perilaku literasi' di sekolah akan sangat berguna bagi evaluasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) ke depan.

4. Keterbatasan data juga tampak dari tahun data yang tidak seragam, melainkan merentang dari tahun 2015 - 2018 (empat tahun). Data dari tahun 2015 ialah hasil Susenas MSBP yang proses surveinya dilakukan setiap tiga tahun sekali. Survei Susenas MSBP terakhir dilakukan di tahun 2018 dan datanya baru dapat dirilis di tahun 2019. Sebagian data lainnya berasal dari tahun 2017, antara lain Susenas KOR dan Dapodik. Sedangkan data tahun 2018 ialah data dari komunitas literasi.
5. Data mengenai jumlah sekolah, perpustakaan sekolah, serta petugas pengelola perpustakaan sekolah masih terbatas kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi tidak termasuk *madrasah ibtidaiyah*, *tsanawiyah*, dan *aliyah* yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.



HARI INI
KAMI
CERITA
HARI MAU
SAMA
GURU
BUTET



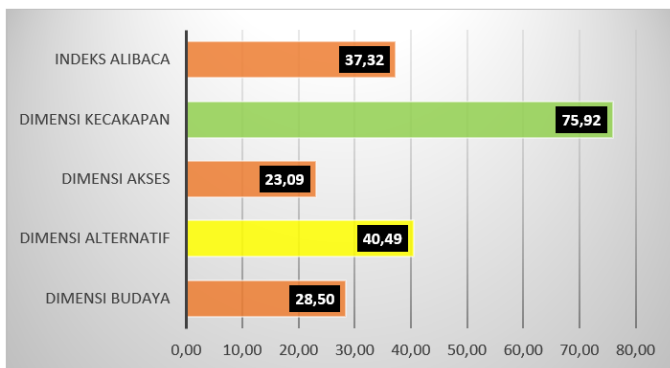
BAB 4

INDEKS AKTIVITAS LITERASI MEMBACA

4.1. Indeks Alibaca Nasional

Hasil penghitungan Indeks Alibaca memperlihatkan bahwa angka rata-rata Indeks Alibaca Nasional masuk dalam kategori *aktivitas literasi rendah*, yaitu berada di angka 37,32. Nilai itu tersusun dari empat indeks dimensi, antara lain *Indeks Dimensi Kecakapan* sebesar 75,92; *Indeks Dimensi Akses* sebesar 23,09; *Indeks Dimensi Alternatif* sebesar 40,49; dan *Indeks Dimensi Budaya* sebesar 28,50. Nilai indeks pada tiap dimensi merupakan agregat dari indikator-indikator yang telah dinormalisasi dengan angka minimum dan maksimum sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, khusus pada pembahasan 3.4. Proses Penyusunan Indeks.

Pada Grafik 4.1. tampak bahwa distribusi pada keempat dimensi sekaligus memperlihatkan sumbangan masing-masing dimensi terhadap indeks nasional, di mana *Indeks Dimensi Kecakapan* memberikan sumbangan terbesar, disusul *Indeks Dimensi Alternatif*, *Indeks Dimensi Budaya*, serta *Indeks Dimensi Akses* yang menyumbang peranan terkecil. Hasil ini memberikan gambaran capaian pada keempat dimensi sekaligus kekurangan yang perlu disokong kemajuannya.



Grafik 4.1. Indeks Alibaca Nasional Menurut Dimensi

Sumbangan terbesar pada *Dimensi Kecakapan* diperoleh dari dua indikator, yaitu angka bebas buta aksara latin dengan poin 96,76 (kategori *tinggi*) dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 55,08 (kategori *sedang*). Dua indikator ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat melalui perluasan akses terhadap pendidikan sudah semakin baik.

Dimensi Akses tersusun dari subdimensi akses di sekolah dan subdimensi akses di masyarakat. Untuk *subdimensi akses di sekolah* poinnya diperoleh dari dua indikator, yaitu perpustakaan sekolah dalam kondisi baik sebesar 24,06 (kategori *rendah*) dan persentase petugas pengelola perpustakaan sekolah sebesar 14,34 (kategori *sangat rendah*).

Sedangkan pada *subdimensi akses di masyarakat* indikator penyumbangannya memiliki poin yang cukup variatif, antara lain keberadaan perpustakaan umum dengan poin 47,09 (kategori *sedang*); keberadaan perpustakaan komunitas sebesar 13,16 (kategori *sangat rendah*); serta rumah tangga yang membeli surat kabar dan majalah masing-masing 32,46 (kategori *rendah*) dan 20,02 (kategori *rendah*).

Untuk *indikator perpustakaan umum* tersusun oleh tiga komposit, antara lain (1) keberadaan perpustakaan provinsi, (2) perpustakaan kabupaten/kota, dan (3) perpustakaan desa. Dari

ketiga komposit tersebut, perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota menyumbang peran besar karena setiap provinsi dan kabupaten/kota saat ini umumnya telah memiliki perpustakaan daerah. Sementara untuk perpustakaan desa masih sangat kurang jumlahnya apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Sebagaimana amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di setiap jenjang pemerintahan, idealnya terdapat satu perpustakaan umum. Hasil ini menunjukkan bahwa fokus penyediaan akses perpustakaan yang perlu didorong ialah perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas di mana jumlahnya masih sangat kurang dibandingkan jumlah penduduk dan jumlah desa/kelurahan yang ada.

Kondisi di atas memberikan gambaran perlunya upaya serius agar akses siswa terhadap bahan literasi di sekolah dapat lebih ditingkatkan. Begitu pula akses masyarakat melalui perpustakaan umum serta perpustakaan komunitas perlu didorong agar masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap bahan-bahan literasi.

Pada *Dimensi Alternatif* yang menjadi penyumbang terbanyak kedua, tersusun dari tiga indikator. Apabila dirunut berdasarkan sumbangan terbesar terhadap indeks *Dimensi Alternatif* maka urutannya sebagai berikut: sekolah yang memiliki jaringan internet sebesar 46,33 (kategori *sedang*), anggota rumah tangga yang mengakses internet sebesar 37,78 (kategori *rendah*), serta anggota rumah tangga yang menggunakan komputer sebesar 37,36 (kategori *rendah*).

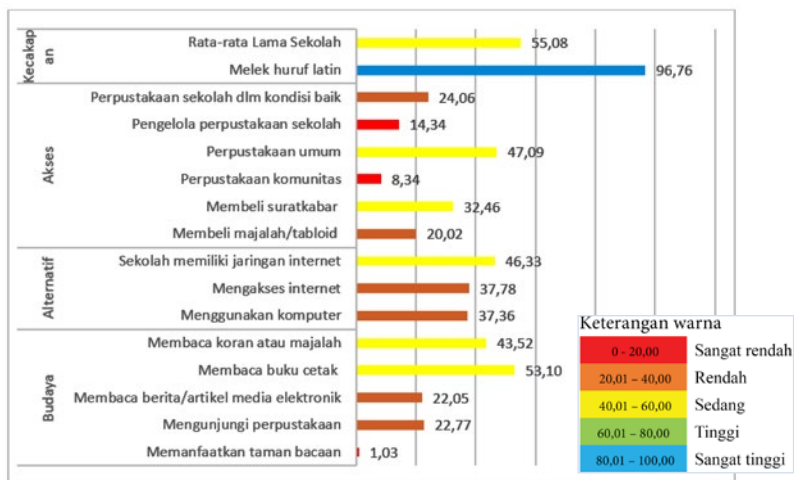
Dilihat dari angka-angka di atas, maka persentase pengguna komputer dan mengakses internet secara nasional masih cukup rendah. Sementara jaringan internet di sekolah mendekati angka setengah dari jumlah sekolah yang ada. Potensi jaringan internet yang telah banyak dimanfaatkan sebetulnya cukup besar sehingga perlu diarahkan untuk menunjang akses terhadap bahan-bahan literasi.

Terakhir *Dimensi Budaya* tergambarkan melalui kebiasaan perilaku literasi masyarakat. Dimensi ini tersusun dari lima indikator, antara lain anggota rumah tangga yang membaca surat

kar/majalah sebesar 43,52 (kategori *sedang*); anggota rumah tangga yang membaca buku cetak yang memiliki poin sebesar 53,10 (kategori *sedang*); anggota rumah tangga yang membaca berita atau artikel di media elektronik/internet sebesar 22,05 (kategori *rendah*); anggota rumah tangga yang mengunjungi perpustakaan sebesar 22,27 (kategori *rendah*); dan terakhir anggota rumah tangga yang memanfaatkan taman bacaan sebesar 1,03 (kategori *sangat rendah*).

Pada dimensi budaya tampak bahwa ‘kebiasaan membaca’ masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Hal itu terlihat dari sumber-sumber literasi baik cetak maupun elektronik yang masih minim diakses, begitu pula kebiasaan berkunjung ke perpustakaan dan memanfaatkan taman bacaan angkanya masih sangat minor. Upaya sosialisasi melalui gerakan literasi maupun gerakan gemar membaca menemukan tantangan dari rendahnya kebiasaan membaca tersebut.

Pemerian sumbangan nilai masing-masing indikator pada Indeks Alibaca Nasional dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini.



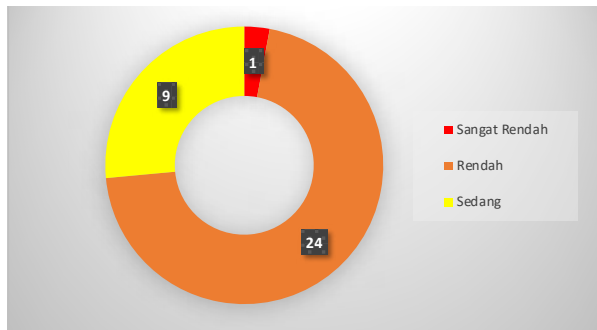
Grafik 4.2. Nilai Per Indikator pada Indeks Alibaca Nasional

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata nasional indeks aktivitas literasi membaca termasuk

dalam kategori *rendah*. Namun demikian, dari empat dimensi yang menyumbang pada indeks tersebut terdapat satu dimensi yang cukup menonjol, yaitu dimensi kecakapan yang menunjukkan upaya pemerataan pendidikan sudah cukup baik. Dimensi lainnya yang cukup positif juga tampak pada *Dimensi Alternatif*, di mana masyarakat secara umum mulai memanfaatkan perangkat teknologi informasi, meskipun akses terhadap komputer dan internet masih perlu didorong lagi pemerataannya. Rendahnya angka indeks pada *Dimensi Akses* dan *Dimensi Budaya* menunjukkan perlunya perhatian terhadap dua dimensi ini untuk ditingkatkan.

4.2. Indeks Alibaca Provinsi

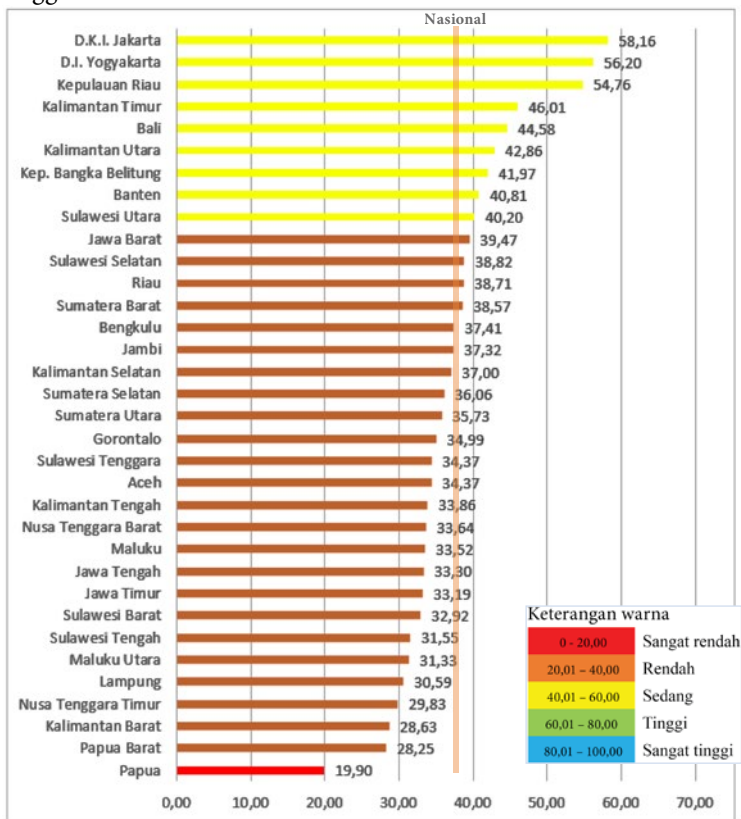
Dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, 9 provinsi (26%) masuk dalam kategori aktivitas literasi *sedang* (angka indeks antara 40,01 – 60,00); 24 provinsi (71%) masuk kategori *rendah* (20,01 – 40,00); dan 1 provinsi (3%) masuk kategori *sangat rendah* (0 – 20,00) (lihat grafik 4.3). Artinya sebagian besar provinsi berada pada level *aktivitas literasi rendah* dan tidak satu pun provinsi termasuk ke dalam level *aktivitas literasi tinggi* dan *sangat tinggi* (nilai indeks antara 60,01 – 80,00 dan 80,01 – 100,00).



Grafik 4.3. Jumlah Provinsi Menurut Tingkat Aktivitas Literasi.

Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia berada pada level *aktivitas literasi rendah*. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Alibaca Nasional yang juga berada di level *aktivitas literasi rendah* (angka indeks 37,32). Hasil perhitungan

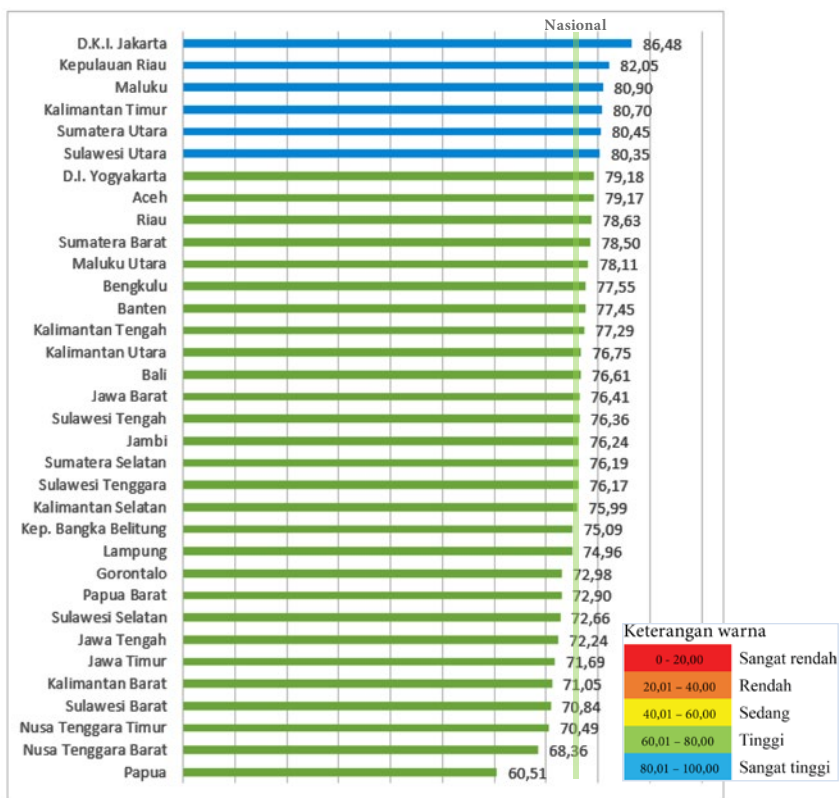
indeks provinsi juga menunjukkan kecenderungan yang juga serupa dengan hasil indeks nasional, di mana *Dimensi Kecakapan* memiliki poin tertinggi, disusul *Dimensi Alternatif*, *Dimensi Budaya*, dan terakhir *Dimensi Akses*. Kecenderungan lainnya yang tampak ialah provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota relatif sedikit umumnya mendapatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang memiliki kabupaten/kota dalam jumlah banyak. Berikut Indeks Alibaca Provinsi menurut peringkat dari tinggi ke rendah:



Grafik 4.4. Indeks Alibaca Provinsi menurut Peringkat dari Tinggi ke Rendah.

Hasil perhitungan indeks provinsi pada Grafik 4.4. di atas menunjukkan peringkat 3 provinsi dengan nilai indeks tertinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan angka indeks 58,16; D.I. Yogyakarta dengan angka 56,20; dan Kepulauan Riau dengan angka 54,76. Meskipun demikian, tiga provinsi tersebut belum mencapai kategori *aktivitas literasi tinggi* karena indeks ketiganya belum melampaui angka 60,01 atau dengan kata lain masih berada di level *aktivitas literasi sedang*. Di peringkat terendah ialah Provinsi Papua dengan angka indeks 19,90 dan termasuk kategori *aktivitas literasi sangat rendah* (berada pada rentang angka 0 – 20,00); kemudian Papua Barat dengan angka 28,25 dan Kalimantan Barat dengan angka 28,63 – keduanya termasuk kategori *rendah* (rentang 20,01 – 40,00).

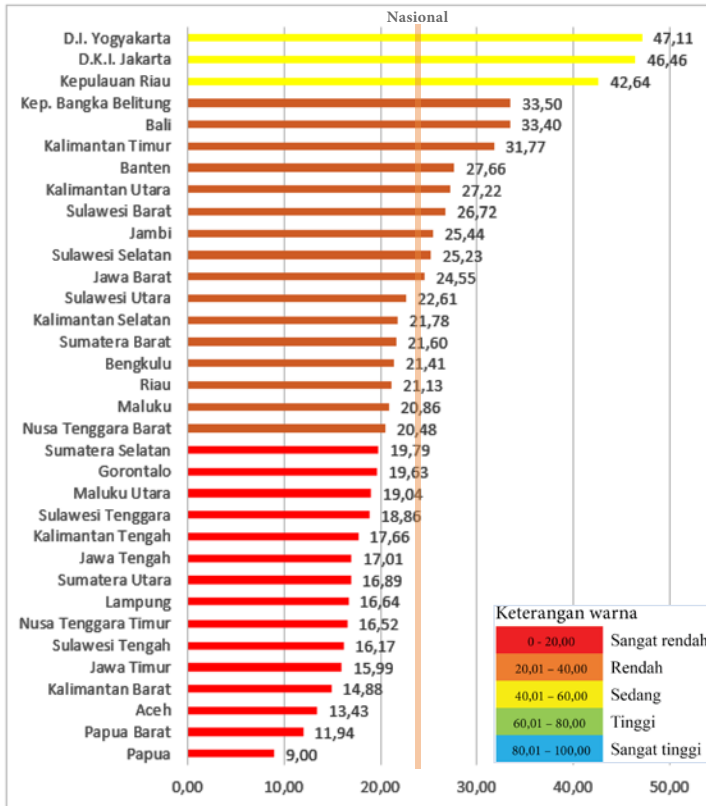
Pada *Dimensi Kecakapan*, sebanyak 6 provinsi berada pada kategori *sangat tinggi*, sementara 28 provinsi lainnya termasuk kategori *tinggi*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan buta aksara dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di sebagian besar provinsi di Indonesia telah berjalan baik. Meskipun demikian, harus digarisbawahi bahwa *tingginya angka bebas buta aksara dan angka RLS tidak dengan sendirinya menggambarkan mutu kecakapan yang dimiliki*, sebab untuk membuktikan kecakapan tersebut diperlukan instrumen pengukuran yang memadai. Selain itu, dari hasil penghitungan *Indeks Kecakapan* juga diketahui terdapat 3 provinsi tertinggi pada dimensi ini, yaitu DKI Jakarta dengan angka *Indeks Dimensi Kecakapan* sebesar 86,48; disusul Kepulauan Riau sebesar 82,05; dan Maluku sebesar 80,90. Sedangkan 3 provinsi dengan *Indeks Dimensi Kecakapan* terendah ialah Papua (dengan angka 60,51), Nusa Tenggara Barat (68,36), dan Nusa Tenggara Timur (70,49) (lihat grafik 4.5).



Grafik 4.5. Indeks Dimensi Kecakapan Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah.

Dimensi Akses merupakan dimensi dengan angka terendah, di mana sebanyak 3 provinsi masuk kategori *sedang*, 16 provinsi termasuk kategori *rendah*, dan 15 provinsi lainnya *sangat rendah* (lihat grafik 4.6). Dimensi ini tersusun dari indikator akses di sekolah, seperti persentase perpustakaan sekolah dalam kondisi baik dan petugas pengelola perpustakaan sekolah, serta indikator akses di masyarakat seperti tergambar pada persentase perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, rumah tangga yang membeli surat kabar/koran, dan rumah tangga yang membeli majalah/tabloid. Rendahnya *Dimensi Akses* menyiratkan pesan perlunya perhatian berbagai

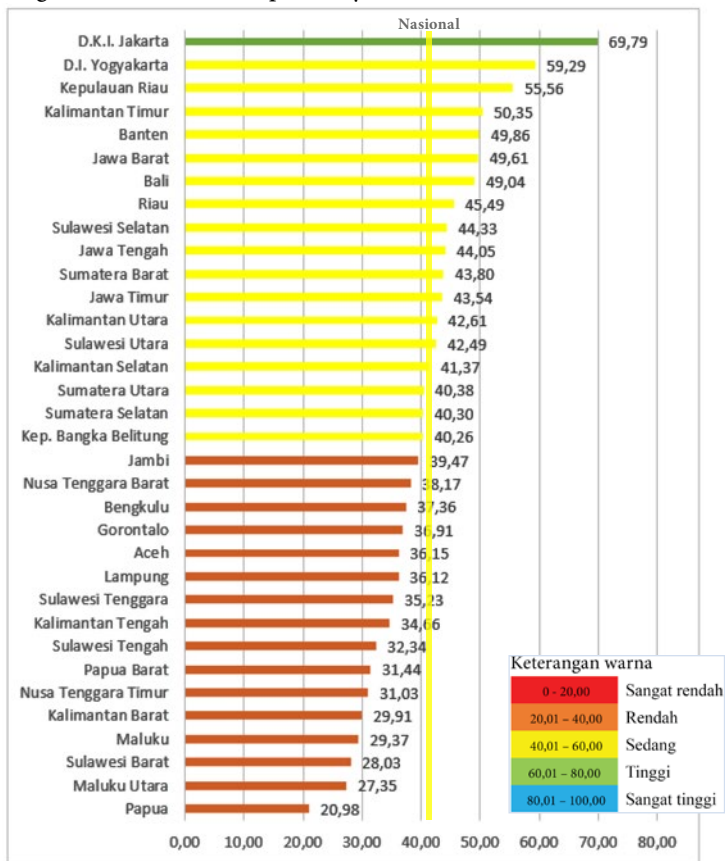
pihak untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan-bahan literasi.



Grafik 4.6. Indeks Dimensi Akses Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah

Pada *Dimensi Alternatif* yang menggambarkan penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi dalam mengakses sumber literasi, DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi masuk kategori *tinggi*, sedangkan D.I. Yogyakarta bersama 16 provinsi lainnya masuk kategori *sedang*, serta 16 provinsi sisanya masuk kategori *rendah* (lihat grafik 4.7.). Tiga provinsi dengan nilai *Indeks Dimensi Alternatif* tertinggi ialah DKI Jakarta (69,79),

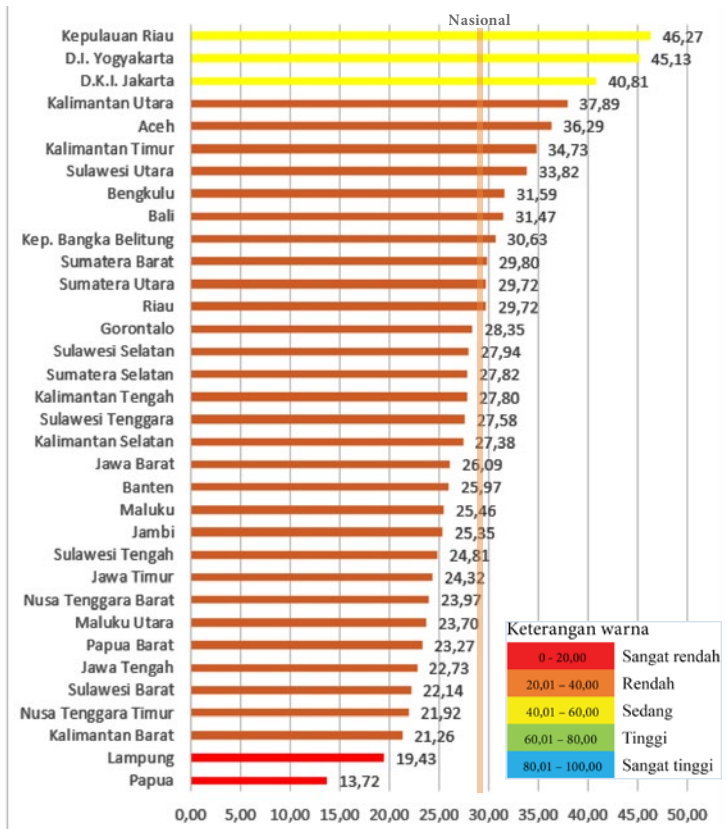
D.I. Yogyakarta (59,29), dan Kepulauan Riau (55,56). Sedangkan 3 provinsi dengan nilai indeks terendah ialah Provinsi Papua (20,98), Maluku Utara (27,35), dan Sulawesi Barat (28,03). Nilai indeks pada dimensi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap komputer dan jaringan internet belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia.



Grafik 4.7. Indeks Dimensi Alternatif Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah

Kemudian pada *Dimensi Budaya* yang merepresentasikan perilaku atau kebiasaan mengakses bahan literasi terdapat 3 provinsi mengantongi nilai dalam kategori *sedang*, 29 provinsi dalam kategori

rendah, dan 2 provinsi dalam kategori *sangat rendah* (lihat grafik 4.8.). Tiga provinsi teratas ialah Provinsi Kepulauan Riau (46,27), D.I. Yogyakarta (45,13), dan DKI Jakarta (40,81). Sedangkan tiga provinsi dengan nilai indeks terendah ialah Provinsi Papua (13,72), Lampung (19,43), dan Kalimantan Barat (21,26). Nilai pada indeks *Dimensi Budaya* menggambarkan rendahnya kebiasaan masyarakat dalam membaca surat kabar cetak, media elektronik/internet, serta minimnya kunjungan ke perpustakaan dan pemanfaatan taman bacaan.



Grafik 4.8. Indeks Dimensi Budaya Provinsi dari Peringkat Tinggi ke Rendah


Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan *Dimensi Kecakapan* sejauh ini belum didukung oleh ketiga dimensi lainnya. Upaya meningkatkan *Dimensi Kecakapan* melalui perluasan akses terhadap pendidikan yang sejauh ini sudah cukup berhasil, perlu dilengkapi dengan usaha untuk memajukan tiga dimensi lainnya, yaitu *Dimensi Akses*, *Dimensi Alternatif*, dan *Dimensi Budaya*. *Dimensi Kecakapan* yang relatif memadai tidak dapat menunjang terjadinya aktivitas literasi yang tinggi apabila tidak tersedia *Dimensi Akses* yang baik, *Dimensi Alternatif* yang memadai, dan kebiasaan atau perilaku membaca sebagaimana tergambar dalam *Dimensi Budaya*. Di samping itu, perlu usaha-usaha khusus untuk memerhatikan rendahnya aktivitas literasi di beberapa daerah, terutama di beberapa provinsi yang memiliki angka indeks terendah.

**PERPUSTAKAAN
JALANAN
DIY**

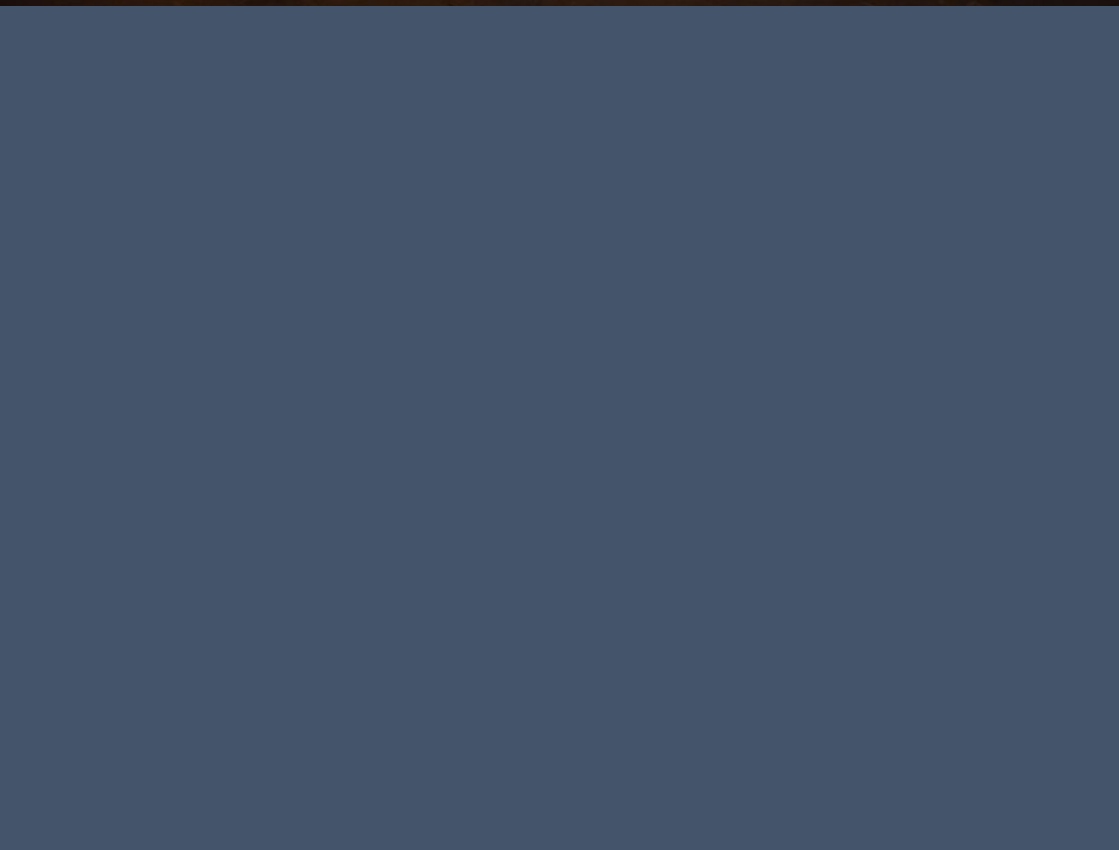
**MEMBACA
MENYAMBUNG
RASA
MEMBACA
MEMBEKASKAN
RASA**



**SETIAP JUMAT
16.00 - 22.00
DATANG
BACA
DISKUSI**



PERPUSTAKAAN
JALANAN
DIY





BAB 5

PRAKTIK BAIK PENYELENGGARAAN FASILITAS LITERASI PUBLIK

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan hasil penghitungan indeks yang disusun berdasarkan data sekunder. Secara umum, hasil Indeks Alibaca Nasional maupun provinsi menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan. Sebanyak 9 provinsi (38%) masuk dalam kategori *sedang*, 14 provinsi (58%) masuk dalam kategori *rendah*, dan 1 provinsi (4%) masuk dalam kategori *sangat rendah*.

Meskipun demikian, geliat penyelenggaraan aktivitas literasi di sejumlah daerah memunculkan optimisme tersendiri. Oleh sebab itu, pada bagian ini, akan dideskripsikan secara ringkas perihal praktik baik penyelenggaraan fasilitas literasi publik yang disusun dari hasil observasi dan wawancara di beberapa daerah, antara lain Pontianak, Surabaya, Padang, Ternate, dan Serang. Sebaran kota yang diteliti diharapkan dapat mewakili gambaran kondisi literasi secara umum di Indonesia, sehingga dapat menjadi preseden bagi upaya untuk meningkatkan aktivitas literasi masyarakat di berbagai daerah lainnya.

Deskripsi dalam bagian ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, antara lain (1) praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong aktivitas literasi warga; (2) peran sekolah dalam menggalakkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS); serta (3) peran perpustakaan komunitas atau taman bacaan yang juga memiliki andil dalam menyediakan akses bacaan dan menghidupkan aktivitas literasi warga.

5. 1. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas literasi warga salah satunya dapat dilihat melalui adanya kebijakan yang mendorong masyarakat agar memiliki budaya baca. Di tingkat nasional, keberadaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dijabarkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan cukup jelas mengatur bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca.

Pada Pasal 8 UU Nomor 43/2007 misalnya, disebutkan kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, antara lain dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, menggalakkan promosi gemar membaca, serta menyelenggarakan perpustakaan umum dengan kekhasan daerah masing-masing. Penyelenggaraan perpustakaan umum tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Namun penjabaran dan pelaksanaan UU Perpustakaan di daerah sejauh ini belum merata. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru terdapat 70 peraturan daerah mengenai perpustakaan (JDIH Kemdagri, 2018), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Sebanyak 31 Peraturan Daerah (Perda) berisi mengenai pembentukan organisasi perpustakaan;
2. Sebanyak 4 Perda mengenai pengaturan biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan dan denda

pengembalian buku yang terlambat; dan

3. Sebanyak 35 Perda mengenai pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta penumbuhan gemar membaca.



Grafik 5.1. Jumlah Perda Mengenai Perpustakaan

Dari tiga kelompok Perda di atas, kebijakan yang tampak mendukung usaha untuk menumbuhkan budaya baca terutama terdapat pada kelompok ketiga, yaitu Perda mengenai pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sementara Perda mengenai pembentukan organisasi perpustakaan khusus mengatur pembentukan unit kerja baru berikut tugas dan fungsinya. Begitu pula Perda mengenai pengaturan biaya administrasi justru tampak “membatasi” upaya masyarakat mengakses perpustakaan, karena pengenaan biaya terutama ditujukan salah satunya untuk pendapatan daerah.

Apabila dikelompokkan menurut level pemerintah daerah, maka hanya terdapat 8 provinsi dan 27 kabupaten/kota yang memiliki aturan mengenai pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Melihat masih minimnya kebijakan Pemda baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, maka tidak mengherankan apabila upaya untuk mendorong aktivitas literasi masyarakat juga tidak begitu memadai.

Keberadaan Perda menjadi indikasi kuat adanya usaha dari pemerintah daerah untuk mewujudkannya menjadi program yang

dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usaha ini misalnya terlihat dari linimasa kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan cita-cita sebagai Kota literasi.

Sejak 2009, Pemkot Surabaya telah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Berbekal dua kebijakan ini, Pemkot Surabaya mulai melakukan berbagai program untuk mendorong meningkatnya literasi warga, antara lain:

1. Perpustakaan sekolah didorong agar mengikuti standar nasional perpustakaan, sehingga kondisi bangunan, fasilitas, dan jumlah koleksinya memadai;
2. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran tentang “kurikulum wajib baca” agar setiap sekolah mewajibkan siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah;
3. Menyediakan akses perpustakaan umum di dua tempat, yaitu di Balai Kota dan di Kecamatan Rungkut;
4. Mendirikan perpustakaan di taman kota, serta mendukung berdirinya ratusan taman bacaan di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mendekatkan akses buku kepada masyarakat; dan
5. Merekrut tenaga honor untuk mengelola perpustakaan sekolah dan taman bacaan di perkampungan yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya.

Upaya untuk meluaskan akses bacaan kepada warga juga ditempuh oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan menyediakan Rumah Baca di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Timur, serta membangun Rumah Baca di beberapa taman kota, seperti Taman Akcaya, Taman Alun Kapuas, dan Taman Digulis. Dinas Perpustakaan Kota Pontianak juga menyediakan layanan perpustakaan di sekitar Politeknik Negeri Pontianak. Pada hari libur, terutama pada penyelenggaraan *car free day* (CFD),

Dinas Perpustakaan menyediakan layanan mobil perpustakaan keliling. Dengan terobosan tersebut, jumlah kunjungan atau akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan meningkat tajam, dari 8.452 pengunjung di tahun 2014 menjadi 19.946 pengunjung di tahun 2015.

Rumah baca di Kota Pontianak buka dari pukul 08.00 - 21.00 WITA, sedangkan pada akhir pekan buka sampai pukul 15.00 WITA. Koleksi buku di rumah baca berkisar antara 1.000 – 2.000 eksemplar. Sebagian buku merupakan sumbangan dari Bank Indonesia. Selain memiliki koleksi buku, rumah baca juga berlangganan beberapa majalah anak-anak setiap bulannya.

Pengunjung terbanyak dari rumah baca umumnya anak-anak dan pelajar. Selain membaca di tempat, pengunjung juga dapat mendaftar menjadi anggota perpustakaan sehingga dapat meminjam buku. Untuk mengelola rumah baca, Dinas Perpustakaan menugaskan staf mereka sesuai jadwal yang ditentukan. Petugas yang mengelola rumah baca di luar jam kerja akan mendapatkan uang lembur.

Kota Surabaya dan Pontianak memiliki kesamaan dalam upaya meluaskan akses terhadap bacaan, yaitu dengan cara membuka gerai bacaan di taman kota atau di dekat perkampungan warga serta menggaji staf yang khusus mengelola gerai bacaan tersebut. Di kota lain, upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan juga dilakukan dengan beragam cara, salah satunya dengan lomba kunjungan ke perpustakaan umum. Dinas Perpustakaan Kota Ternate misalnya, setiap tahun memberikan penghargaan kepada sekolah yang siswanya tercatat paling banyak berkunjung ke perpustakaan kota.

Di luar usaha-usaha di atas, setiap perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebetulnya telah memiliki layanan mobil perpustakaan keliling (MPK), beberapa di antaranya merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Selain MPK, Perpustakaan juga memberikan bantuan perahu pustaka dan motor pustaka di beberapa daerah. Keberadaan MPK cukup vital untuk melayani masyarakat yang enggan atau tidak sempat berkunjung ke

perpustakaan umum. Layanan MPK bahkan juga dapat membantu GLS dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah secara berkala.

5.2. Peran Sekolah melalui Program GLS

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diluncurkan sejak 2016 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang berupaya memperkuat budaya literasi siswa melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Sebelum program ini diluncurkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya telah memiliki kebijakan untuk menstandarisasi sarana perpustakaan dan petugas pengelola perpustakaan yang menjadi urat nadi dari GLS. Dua aturan tersebut antara lain Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah dan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

Namun pelaksanaan dua kebijakan yang berupaya mengoptimalkan peran perpustakaan sekolah tersebut belum maksimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik, serta masih kurang memadainya jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah (lihat Bab IV mengenai Dimensi Akses di Sekolah). Akibatnya, pelaksanaan GLS menemui kendala terutama minimnya koleksi bacaan yang baik dan memadai, serta kurangnya dukungan SDM yang baik untuk mendukung kelangsungan program tersebut (lihat hasil kajian K. Laksono dan P. Retnaningdyah, 2018; Nur Berlian dkk., 2018).

Meskipun demikian, terdapat usaha dari sekolah lintas jenjang yang berupaya memaksimalkan program GLS. Sekolah-sekolah tersebut berupaya menghidupkan GLS melalui tiga cara:

Pertama, menyelenggarakan program pembiasaan dan pengembangan. Program pembiasaan meliputi kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai dan wajib kunjungan ke perpustakaan sekolah. Kegiatan membaca 15 menit diselenggarakan

di luar kelas maupun di dalam kelas. SDN 2 Kota Serang, misalnya mengadakan kegiatan literasi di lapangan setiap hari Selasa. Untuk program wajib kunjungan ke perpustakaan, biasanya dikelola oleh petugas pengelola perpustakaan yang bekerja sama dengan wali kelas. Setiap kelas mendapatkan jatah kunjungan satu kali dalam seminggu untuk berkunjung pada saat jam pelajaran.

Sedangkan untuk *program pengembangan* meliputi berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan program literasi, seperti ekstrakurikuler di bidang jurnalistik, kesenian (pelatihan menulis dan membaca puisi, teater), dan karya ilmiah remaja (KIR). Beberapa sekolah bahkan berupaya mendorong guru dan siswa untuk menerbitkan karya, misalnya SMPN 3 Pontianak yang secara berkala menerbitkan antologi puisi dan pantun, atau SMPN 1 Kota Serang yang mendorong guru untuk menerbitkan karya secara mandiri.

Kedua, membangun sarana literasi yang memadai, meliputi perpustakaan sekolah, sudut baca atau teras baca di lingkungan sekolah, serta pojok baca di masing-masing kelas. Keberadaan perpustakaan sekolah sangat vital untuk mendukung GLS karena bahan bacaan untuk mendukung program GLS berasal dari perpustakaan. Namun karena terbatasnya waktu kunjungan siswa serta kurangnya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan, maka diperlukan sudut baca atau teras baca di sekitar sekolah agar siswa di waktu-waktu senggang dapat mengakses buku. Sementara pojok baca di masing-masing kelas terutama berfungsi untuk mendukung kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai.

Ketercukupan koleksi bacaan menjadi hal yang urgen agar sarana perpustakaan atau sudut baca dapat berfungsi maksimal. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sekolah seharusnya mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah untuk pengembangan perpustakaan. Sayangnya ketentuan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 hanya disebutkan bahwa penggunaan dana BOS sebesar 20% digunakan untuk

pembelian buku teks. Apabila kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%, maka sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya. Ketentuan dalam Permendikbud tersebut sebetulnya telah membuka kemungkinan agar dana BOS dapat juga digunakan bagi pengembangan perpustakaan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan buku teks siswa, buku pengayaan, berlangganan koran/majalah, pemeliharaan dan pembelian buku baru, peningkatan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan, serta pemenuhan perlengkapan lainnya, seperti perabot dan pendingin ruangan. Namun karena penggunaan dana BOS untuk penambahan koleksi sejauh ini masih “bernada anjuran”, tidak seperti pembelian buku teks yang bersifat wajib, membuat sebagian besar sekolah menganggapnya bukan sebagai prioritas.

Meskipun demikian, beberapa sekolah berupaya memenuhi tambahan koleksi buku bacaan dengan cara menganjurkan orang tua siswa untuk menyumbangkan buku ke sekolah, misalnya melalui program satu siswa satu buku yang disumbangkan ke sekolah, atau siswa yang lulus dianjurkan untuk menyumbang buku ke perpustakaan sekolah. Alumni sekolah juga diminta untuk turut menyumbang buku ke sekolah seperti terjadi di SMAN 5 Kota Surabaya dan SMAN 10 Kota Pontianak. Anjuran tersebut dapat diterapkan terutama di kota-kota besar di mana toko buku cukup tersedia dan siswa berasal dari kalangan mampu. Kebijakan serupa tidak dapat diterapkan di daerah terpencil karena selain sulitnya mendapatkan buku, umumnya siswa juga berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Ketiga, SDM yang mendukung program GLS, yaitu Tim Literasi Sekolah dan petugas pengelola perpustakaan sekolah. Tim Literasi Sekolah dan petugas pengelola perpustakaan sekolah dibentuk melalui SK Kepala Sekolah yang diharapkan dapat bekerja sama menyelenggarakan berbagai program literasi, seperti kegiatan membaca 15 menit maupun wajib kunjungan ke perpustakaan. Mereka juga dapat berkolaborasi untuk menyelenggarakan lomba dan memberikan penghargaan kepada siswa, misalnya melalui pemilihan Duta Literasi sekolah, pemberian penghargaan kepada pengunjung dan peminjam buku terbanyak, serta memberikan

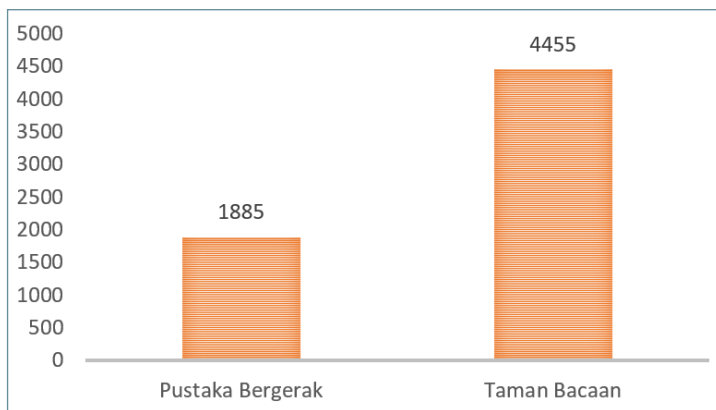
penghargaan pada kegiatan lomba menulis puisi, cerpen, maupun esai.

Mengingat pentingnya SDM pengelola perpustakaan, beberapa daerah secara khusus merekrut petugas pengelola perpustakaan sekolah, misalnya Dinas Perpustakaan Kota Surabaya yang merekrut tenaga honor yang dilatih untuk mengelola perpustakaan sekolah. Begitu pula Pemerintah Kota Padang yang menggaji tenaga honor melalui APBD untuk menjadi petugas perpustakaan sekolah. Sedangkan daerah lainnya hanya mengandalkan tenaga honor yang digaji melalui dana BOS (sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017). Urgensi petugas pengelola perpustakaan sekolah sebetulnya telah diatur melalui Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Namun pelaksanaannya belum maksimal.

5. 3. Peran Perpustakaan Komunitas

Survei Komite Buku Nasional tahun 2016 di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya memiliki koleksi tak lebih dari 5 buku. Sementara survei Perpustakaan Nasional tahun 2015 di 28 kabupaten/kota menunjukkan rendahnya alokasi dana untuk pembelian buku, yaitu tak lebih dari 100 ribu rupiah dalam setahun. Apabila di kota besar saja sedemikian rendahnya kepemilikan dan daya beli buku, tentu kondisi di pelosok bakal lebih memprihatinkan lagi.

Di sisi lain, layanan perpustakaan umum seperti perpustakaan provinsi maupun perpustakaan kabupaten/kota hanya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten, kota, atau provinsi. Di daerah pelosok, praktis masyarakat tidak mendapatkan layanan literasi yang memadai. Untunglah ada individu dan kelompok masyarakat yang berusaha menerabas keterbatasan itu guna menyediakan akses bacaan di berbagai daerah. Mereka membangun taman baca dengan tempat seadanya, di garasi, teras rumah, maupun bangunan sederhana, atau membawa buku dengan berbagai armada pustaka, seperti sepeda, becak, motor, hingga perahu pustaka.



Grafik 5.2. Jumlah Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak

Komunitas literasi inilah yang secara mandiri mampu melayani kebutuhan bahan bacaan di daerah. Meskipun jumlahnya belum “seberapa” dibanding luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia, namun keberadaannya penting untuk mendorong terjadinya aktivitas literasi di daerah. Saat ini, terdapat sekitar 6.340 komunitas literasi yang tersebar di seluruh Indonesia (data per Agustus 2018). Mereka merupakan bagian dari jaringan Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) dan Pustaka Bergerak Indonesia (PBI).

Perpustakaan komunitas umumnya tidak hanya melayani peminjaman buku, melainkan memiliki berbagai program mulai dari pendampingan belajar untuk anak-anak dan remaja, berlatih seni, belajar menulis, sampai kursus bahasa Inggris. TBM Jawara di Kota Serang, misalnya, mengadakan ‘gelar buku’, mendongeng, serta permainan untuk anak-anak setiap hari Minggu di bekas Istana Suroswan di Banten Lama. TBM lainnya khusus mendampingi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan rentan, misalnya TBM Kawan Kami di seputar Gang Dolly di Kota Surabaya yang mendampingi anak-anak di bekas kompleks pelacuran, atau TBM Tanah Ombak yang menampingi anak-anak dari keluarga miskin di Kota Padang. Ada pula perpustakaan komunitas yang khusus melayani mahasiswa untuk berdiskusi, menonton film, mengadakan bedah buku, bahkan

konsultasi tugas akhir seperti yang dilakukan di Nation Building Corner Library (NBCL) di Kota Ternate.

Upaya menggerakkan aktivitas literasi warga juga dilakukan oleh para relawan Perpustakaan Umum di Tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Mereka menyelenggarakan program “Di Rumahku Ada Buku”, yaitu membantu 100 rumah di Kelurahan Parit Mayor untuk memiliki rak buku serta memberikan pinjaman buku secara bergilir, di mana setiap rumah disediakan 10 buku. Buku tersebut terdiri dari bacaan dewasa (umumnya keagamaan), dan bacaan untuk anak-anak.


Inovasi program ini didukung oleh pemerintah desa setempat. Melalui Musyawarah Desa, pengelola taman bacaan mengusulkan program dan anggaran, kemudian setelah disetujui, pengelola menjalankan program dengan membeli rak buku, buku-buku bacaan, dan lain-lain. Untuk mengerjakan program ini, pengelola merekrut relawan anak-anak muda usia SMP – SMA di kelurahan Parit Mayor. Ada sekitar 25 relawan literasi yang setiap bulan berkeliling untuk menukarkan buku-buku yang dipinjamkan.


Di tengah minimnya akses bacaan dari layanan perpustakaan umum, keberadaan komunitas literasi di berbagai daerah turut membantu menyemarakkan kegiatan literasi warga. Presiden Joko Widodo bahkan mengapresiasi keberadaan komunitas literasi dengan mengundang mereka ke Istana Negara pada perayaan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2017. Pada kesempatan itu, presiden bahkan mengumumkan kebijakan yang belakangan dikenal sebagai pustaka bebas bea (*free cargo literacy*), di mana pemerintah melalui PT Pos menggratiskan pengiriman buku setiap tanggal 17. Melalui program ini, para donatur buku dapat mengirimkan paket-paket buku bantuan secara gratis ke komunitas literasi di seluruh Indonesia. Sejak Mei 2017 sampai Oktober 2018, tercatat PT Pos telah mengirimkan 45.252 paket buku dengan berat 289 ton, dan biaya pengiriman sebesar 13,5 miliar rupiah.

Jangan Berharap Segalanya Itu Milikmu
Karena Tidak Bermanfaat

NAMA-NAMA HARI
SEVEN DAY'S IN A WEEK

 Monday - Senin

 Tuesday - Selasa

 Wednesday - Rabu

 Thursday - Kamis

 Friday - Jum'at

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Kajian ini telah menghasilkan Indeks Alibaca yang memperlihatkan sejauh mana tingkat aktivitas literasi membaca baik secara nasional maupun peringkat di tiap provinsi. Hasil tersebut merupakan akumulasi dari empat dimensi, antara lain *Dimensi Kecakapan*, *Dimensi Akses*, *Dimensi Alternatif*, dan *Dimensi Budaya*. Dari kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Indeks Alibaca nasional masuk dalam kategori *aktivitas literasi rendah*, sedangkan pada indeks provinsi sebanyak 9 provinsi masuk dalam *kategori sedang*, 24 provinsi masuk dalam kategori *rendah*, dan 1 provinsi masuk dalam kategori *sangat rendah*. Artinya, baik secara nasional maupun provinsi tidak ada yang masuk kategori *tinggi*.
2. Dari peringkat Indeks Alibaca provinsi, terdapat tiga provinsi yang memiliki angka indeks tertinggi, yaitu DKI Jakarta yang menduduki posisi pertama, disusul D.I. Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tiga provinsi yang memiliki indeks terendah antara lain Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat.

3. Baik pada indeks nasional maupun provinsi, dimensi yang menyumbang poin terbesar dalam Indeks Alibaca ialah *Dimensi Kecakapan*. Dimensi ini tersusun dari dua indikator, yaitu bebas buta aksara latin dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kecakapan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan telah memadai. Begitu pula akses terhadap pendidikan formal sudah cukup baik—dengan catatan di beberapa Provinsi angka RLS masih cukup rendah.
4. Dimensi lainnya yang memberikan poin cukup besar yaitu *Dimensi Alternatif*. Dimensi ini tersusun dari indikator sekolah yang memiliki jaringan internet, anggota rumah tangga yang mengakses internet, serta anggota rumah tangga yang menggunakan komputer. Kenyataan ini menyajikan kemungkinan pemanfaatan lebih jauh perangkat elektronik untuk memberdayakan aktivitas literasi masyarakat. Namun, pada dimensi ini juga tampak bahwa akses masyarakat terhadap internet dan perangkat komputer masih belum merata di seluruh daerah.
5. *Dimensi Budaya* yang menunjukkan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi masih rendah. Pada dimensi ini, perilaku masyarakat dalam membaca buku cetak, membaca koran atau majalah, membaca artikel atau berita di media elektronik/internet, serta berkunjung ke perpustakaan umum dan taman bacaan masih rendah.
6. *Dimensi Akses* merupakan dimensi dengan nilai indeks terendah. Dimensi ini terbagi menjadi dua subdimensi, yaitu subdimensi *Akses di Sekolah* dan *Akses di Masyarakat*. Akses di sekolah masuk kategori *sangat rendah* yang ditunjukkan oleh minimnya angka perpustakaan sekolah dalam kondisi baik dan belum memadainya jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah. Sedangkan akses di masyarakat terdiri dari keberadaan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, serta rumah tangga yang membeli surat kabar dan majalah. Dari ketiga indikator pada subdimensi akses di masyarakat tersebut, keberadaan perpustakaan desa

masih jauh dari ideal sehingga perlu ditingkatkan. Jumlah perpustakaan komunitas (taman bacaan dan pustaka bergerak) meskipun masih jauh dari cukup, namun terus tumbuh seiring dengan maraknya aktivitas literasi yang disokong oleh warga dan komunitas, sehingga hal ini cukup menggembirakan dan memberikan alternatif bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau perpustakaan umum.

7. Geliat upaya pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat di sejumlah daerah sebagaimana tergambar pada Bab V sebetulnya menampakkan optimisme. Namun, upaya mereka masih terbatas di sejumlah kabupaten/kota saja. Peraturan daerah yang dapat menjadi acuan kebijakan untuk mendorong aktivitas literasi hanya dimiliki oleh segelintir provinsi dan kabupaten/kota, sehingga sebagian besar daerah belum memiliki acuan hukum yang memadai. Begitu pula praktik baik di sekolah telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, namun belum didorong oleh upaya struktural untuk mewujudkan standar sarana dan prasarana perpustakaan dan standar petugas pengelola perpustakaan secara lebih merata, serta belum adanya usaha sungguh-sungguh untuk menjamin ketersediaan koleksi bacaan di sekolah.
8. Usaha yang dilakukan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dideskripsikan pada Bab V tersebut sekaligus menunjukkan *keterbatasan* dari pengukuran indeks ini karena hanya mampu mengukur di tingkat provinsi. Padahal persoalan tinggi atau rendahnya aktivitas literasi masyarakat sebagaimana tergambar di masing-masing dimensi dan indikator sebetulnya bermuara kepada kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Upaya pemenuhan akses literasi masyarakat, misalnya, merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.

6.2. Rekomendasi

Secara umum hasil Indeks Alibaca menunjukkan bahwa dari empat dimensi yang diukur, hanya *Dimensi Kecakapan* yang secara nasional masuk kategori tinggi, sedangkan pada *Dimensi Alternatif* masuk *kategori rendah*, serta pada *Dimensi Budaya* dan *Dimensi Akses* masuk *kategori rendah* dan *sangat rendah*. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan capaian aktivitas literasi membaca tersebut.

Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian lebih kepada daerah/provinsi yang memiliki tingkat indeks literasi membaca yang rendah, terutama Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat.
2. Pada *Dimensi Alternatif*, akses terhadap komputer masih rendah, selain itu akses terhadap jaringan internet juga belum merata, sehingga perlu dorongan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan komputer dan pemerataan jaringan internet sampai ke pelosok. Upaya itu perlu diimbangi dengan kampanye penggunaan teknologi informasi yang sehat sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi masyarakat.
3. Pada *Dimensi Akses*, perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap bahan-bahan literasi, baik di masyarakat maupun di sekolah.
 - Secara nasional, dasar hukum yang dapat digunakan ialah UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan. Dua produk hukum tersebut memberi landasan bagi pelayanan akses bacaan bagi masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. *Namun demikian, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan turunan (Perda) agar pelaksanaannya di daerah dapat lebih operasional.*

- Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meluaskan akses literasi di masyarakat ialah dengan mewujudkan satu desa satu perpustakaan melalui dana desa. Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 sebetulnya telah menyebutkan bahwa dana desa salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan di bidang pendidikan, antara lain untuk membangun sarana PAUD dan perpustakaan desa. Untuk itu, perlu petunjuk lebih rinci agar setiap penerima dana desa dapat membangun perpustakaan mandiri.
 - Untuk meningkatkan akses literasi di sekolah, landasannya ialah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Sedangkan untuk penambahan koleksi perpustakaan sekolah dapat mengacu kepada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan sekolah seharusnya mengalokasikan dana minimal 5% dari biaya operasional. *Ketentuan ini perlu diperkuat dengan menyebutkannya secara eksplisit melalui petunjuk teknis penggunaan dana BOS.*
4. Pada *Dimensi Budaya*, usaha pembiasaan membaca kepada siswa sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan pembiasaan membaca di rumah. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengampanyekan “Jam Membaca” atau “Jam Belajar Masyarakat” pada jam-jam berkumpul dengan keluarga sebagaimana telah diterapkan di beberapa daerah. Selain itu, sosialisasi dan promosi kegemaran membaca melalui perpustakaan umum dan komunitas literasi, serta menyelenggarakan festival buku (*book fair*) juga merupakan langkah efektif untuk meningkatkan minat baca. Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang

telah menggalakkan kegiatan literasi di daerahnya sehingga dapat menjadi contoh dan dapat mendorong daerah lain mengikuti hal serupa. Penghargaan juga perlu diberikan kepada komunitas dan para pegiat literasi agar usaha untuk meningkatkan aktivitas literasi masyarakat dapat lebih termotivasi.

5. Keterbatasan Indeks Alibaca yang hanya sampai di tingkat provinsi perlu dikembangkan hingga ke tingkat kabupaten/kota agar dapat memberikan gambaran yang lebih memadai dalam cakupan daerah administratif yang lebih kecil, sehingga upaya intervensi dapat lebih terarah. Kabupaten/kota yang telah memiliki praktik baik dalam program literasi juga akan lebih menonjol dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya. Selain itu, perlu kajian minat baca berdasarkan rentang usia atau profesi agar strategi penumbuhan minat baca dapat meningkat sesuai dengan karakteristik sasaran. Hal ini karena perbedaan generasi membuat kultur membaca juga berubah.

Swasta/Dunia Usaha

1. Mendukung pemenuhan akses terhadap bahan-bahan literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dengan membangun perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas.
2. Mendukung keberadaan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas dengan membantu penambahan koleksi buku dan sarana literasi lainnya, serta mendukung pelatihan dan pengembangan bagi SDM pengelola perpustakaan dan pegiat literasi.

Masyarakat/Pegiat Literasi

1. Berpartisipasi meningkatkan aktivitas literasi di lingkungan, antara lain dengan membuat perpustakaan mini di rumah, menyelenggarakan aktivitas membaca secara rutin di tingkat keluarga.
2. Mendukung keberadaan komunitas literasi di wilayah masing-masing atau menjadi donatur bantuan buku yang dapat disalurkan ke sekolah maupun komunitas literasi di seluruh Indonesia melalui program pustaka bebas bea (*free cargo literacy*) setiap tanggal 17 yang dikirim lewat kantor pos.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- ACDP Indonesia. “Pentingnya Membaca dan Penilaian di Kelas-kelas Awal”. Lembar Kerja Desember 2014.
- Amen, Mark, dkk. 2011. *Cities and Global Governance: New Sites for International Relations*. Ashgate.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2018. *Provinsi Aceh Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018. *Provinsi Bali Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2018. *Provinsi Banten Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. 2018. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Bengkulu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. 2018. *Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2018. *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2018. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2018. *Provinsi Jambi Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2018. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2018. *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2018. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2018. *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2018. *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. 2018. *Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kalimantan Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2018. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2018. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2018. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2018. *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 2018. *Provinsi Maluku Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Maluku.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2018. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018. *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2018. *Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2018. *Provinsi Papua Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Papua.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2018. *Provinsi Riau Angka 2018*. BPS Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. 2018. *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2018. *Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. 2018. *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2018. *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2018. *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2018. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barton, David dan Mary Hamilton. “Literacy Practices”, dalam David Barton, Mary Hamilton, dan Roz Ivanič (ed.). 2000. *Situated Literacies: Reading and Writing in Context*. London dan New York: Routledge.
- Berlian, Nur, dkk. 2018. *Evaluasi Program Literasi: Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: memilih di antara lima pendekatan (3rd ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2017. *Buku Panduan Anugerah Literasi Prioritas*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud.
- Heath, Shirley Brice dan Brian V. Street. 2008. *On Ethnography: Approaches to Language and Literacy Research*. New York: Teachers College Press bekerja sama dengan National Conference on Research in Language and Literacy (NCRL).
- Joesoef, Daoed. 2004. *Bukuku Kakiku*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kleden, Ignas. 1999. "Buku di Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik tentang Kebudayaan", bunga rampai dalam Alfons Taryadi [ed.]. 1999. *Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komite Buku Nasional. *History of Publishing in Indonesia*. Jakarta: Komite Buku Nasional.
- Laksono, K. dan P. Retnaningdyah. 2018. "Literacy Infrastructure, Access to Books, and the Implementation of the School Literacy Movement in Primary Schools in Indonesia". IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 296 (2018) 012045.
- Majalah Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Nomor VI/ Oktober-2016.
- Miller, John W. dan Micahel M. McKenna. 2016. *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters*. New York: Routledge.
- OECD. 2008. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

- Perpustakaan Nasional. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perpustakaan Nasional 2016*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Solihin, Lukman, dkk. 2015. *Peran Sekolah dalam Menumbuhkan Budaya Baca*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutarno, N.S. 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tim GLN. 2017. *Panduan Gerakan Literasi Nasional 2017*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Riset Komite Buku Nasional. 2016. "Laporan Survey Buku dan Minat Baca: Studi 7 Kota di Indonesia". Jakarta: Komite Buku Nasional.
- Tim Riset Perpustakaan Nasional. 2011. *Kajian Pembudayaan Kegemaran Membaca*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Tim Riset Perpustakaan Nasional. 2015. *Hasil Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Media Cetak dan Internet

- "Data Peraturan Daerah" dari: <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#> (diakses 10 Oktober 2018).
- "Indonesia second least literate of 61 nations" dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-second-least-literate-61-nations.html> (diakses 5 Mei 2018).
- "Methodology & Some Conclusions" dari: <http://www.ccsu.edu/wmln/methodology.html> (diakses 5 Mei 2018).
- "Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Nasional" dari: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diakses 5 Mei 2018).

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan

PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah

Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS

Kamus

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://en.oxforddictionaries.com>



Lampiran

Pemerian Dimensi dan Indikator

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
D1 Dimensi Kecakapan				
X1	Melek Huruf Latin	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat baca-tulis huruf latin	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017, BPS.	2017
X2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25+	Indeks Pembangunan Manusia 2017, BPS.	2017
D2 Dimensi Akses				
D2.1 Akses di Sekolah				
X3	Perpustakaan Sekolah	Persentase perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
X4	Petugas Pengelola Perpus Sekolah	Persentase petugas pengelola perpustakaan sekolah	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
D2.2 Akses di Masyarakat				
X5	Perpustakaan Umum	Persentase perpustakaan umum tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan perpustakaan desa	Data Perpustakaan Nasional	2017
X6	Perpustakaan Komunitas Per Seribu Penduduk	Persentase perpustakaan komunitas (TBM dan Pustaka Bergerak) per seribu penduduk	Forum Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak Indonesia	Per Agustus 2018
X7	Membeli Surat Kabar	Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli surat kabar/koran	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
X8	Membeli Surat Majalah/Tabloid	Persentase rumah tangga dalam sebulan terakhir yang membeli majalah/tabloid	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
D3 Dimensi Alternatif				
X9	Sekolah Memiliki Akses Internet	Persentase sekolah yang memiliki jaringan akses internet	Data Pokok Pendidikan, PDSPK Kemdikbud.	2017
X10	Mengakses Internet	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengakses internet (termasuk <i>browsing</i> , facebook, twitter, BBM, Whats app dan sejenisnya)	Diolah dari data mentah Susenas Kor, BPS.	2017
X11	Menggunakan Komputer	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan komputer (termasuk PC/Desktop, laptop/notebook, tablet)	Diolah dari data mentah Susenas Kor, BPS.	2017
D4 Dimensi Budaya				
X12	Membaca Surat Kabar	Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir membaca surat kabar, koran, atau majalah cetak	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X13	Membaca Buku Cetak	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam seminggu terakhir membaca buku cetak selain kitab suci	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

No	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Tahun Data
X14	Membaca artikel atau berita dari media elektronik	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam seminggu terakhir membaca artikel/berita dari media elektronik, internet, <i>softcopy</i>	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X15	Mengunjungi Perpustakaan	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam sebulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015
X16	Memanfaatkan Taman Bacaan	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam sebulan terakhir pernah memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat	Diolah dari data mentah Susenas MSBP, BPS.	2015

Data Awal Dimensi Kecakapan

No.	Provinsi	Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah
		X1	X2
1	Aceh	98,47	8,98
2	Bali	96,21	8,55
3	Banten	98,04	8,53
4	Bengkulu	98,63	8,47
5	D.I. Yogyakarta	97,09	9,19
6	D.K.I. Jakarta	99,49	11,02
7	Gorontalo	97,42	7,28
8	Jambi	98,15	8,15
9	Jawa Barat	98,55	8,14
10	Jawa Tengah	96,01	7,27
11	Jawa Timur	94,45	7,34
12	Kalimantan Barat	95,10	7,05
13	Kalimantan Selatan	98,72	7,99
14	Kalimantan Tengah	99,32	8,29
15	Kalimantan Timur	99,00	9,36
16	Kalimantan Utara	96,03	8,62
17	Kepulauan Bangka Belitung	98,31	7,78
18	Kepulauan Riau	98,84	9,79
19	Lampung	97,98	7,79
20	Maluku	99,27	9,38
21	Maluku Utara	98,82	8,61
22	Nusa Tenggara Barat	90,71	6,9
23	Nusa Tenggara Timur	93,32	7,15
24	Papua	79,21	6,27
25	Papua Barat	98,13	7,15
26	Riau	98,86	8,76
27	Sulawesi Barat	92,94	7,31
28	Sulawesi Selatan	92,31	7,95
29	Sulawesi Tengah	97,46	8,29
30	Sulawesi Tenggara	95,94	8,46
31	Sulawesi Utara	99,76	9,14
32	Sumatera Barat	98,86	8,72
33	Sumatera Selatan	99,11	7,99
34	Sumatera Utara	99,24	9,25

Keterangan: Indikator penduduk melek aksara latin diolah dari *Provinsi Dalam Angka 2018* (terdapat 34 publikasi sesuai dengan jumlah provinsi), sedangkan rata-rata lama sekolah dari *Indeks Pembangunan Manusia 2017*.

Data Awal Dimensi Akses

No.	Provinsi	Jumlah Perpus-takaan Kondisi Baik	Jumlah Sekolah	Jumlah Petugas Pengelola Perpus-takaan Sekolah	Jumlah Perpus-takaan Sekolah dalam Kondisi Baik	Jumlah Perpus-takaan Provinsi	Jumlah Perpus-takaan Kabupaten	Jumlah Perpus-takaan Desa	Jumlah TBM dan Pustaka Bergerak	Jumlah penduduk	Persentase Rumah Tangga Membeli Surat kabar/koran	Persentase Rumah Tangga Membeli Majalah/Tabloid	
													X3
1	Aceh	1.093	5.360	103	1.093	1	15	4	1.043	78	1.971.164	5,80	2,02
2	Bali	1.317	3.196	243	1.317	1	8	1	713	27	1.338.000	9,78	2,92
3	Banten	1.838	7.325	138	1.838	1	4	4	609	706	523.550	8,11	3,27
4	Bengkulu	392	2.042	117	392	1	9	1	454	41	4.415.279	8,56	2,73
5	D.I. Yogyakarta	924	2.455	263	924	1	4	1	425	418	723.578	19,76	10,08
6	D.K.I. Jakarta	2.253	4.622	138	2.253	1	5	1	242	284	1.106.896	27,56	13,06
7	Gorontalo	458	1.395	16	458	1	5	1	383	13	3.176.213	5,00	2,98
8	Jambi	598	3.543	162	598	1	8	2	992	32	428.583	9,10	3,49
9	Jawa Barat	5.512	29.526	807	5.512	1	18	9	2.573	647	1.248.552	10,42	4,7
10	Jawa Tengah	5.910	24.827	1.192	5.910	1	29	6	782	535	16.633.500	6,32	3,16
11	Jawa Timur	5.769	27.643	691	5.769	1	29	9	1.009	822	11.070.187	7,77	4,01
12	Kalimantan Barat	1.302	6.388	125	1.302	1	12	2	378	112	12.123.128	7,45	3,08

No.	Provinsi	X3		X4		X5			X6		X7		X8	
		Jumlah Perpustakaan Kondisi Baik	Jumlah Sekolah	Jumlah Petugas Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah dalam Kondisi Baik	Jumlah Perpustakaan Provinsi	Jumlah Perpustakaan Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Desa	Jumlah TBM dan Pustaka Bergerak	Jumlah penduduk	Persentase Rumah Tangga Membeli Surat kabar/koran	Persentase Rumah Tangga Membeli Majalah/Tabloid		
13	Kalimantan Selatan	1.022	3.835	198	1.022	1	11	2	509	28	1.805.191	10,35	4,19	
14	Kalimantan Tengah	777	3.851	61	777	1	12	1	561	23	1.444.774	7,92	4,37	
15	Kalimantan Timur	837	2.965	192	837	1	6	3	479	61	920.833	19,90	7,06	
16	Kalimantan Utara	147	734	40	147	1	3	1	294	51	1.238.982	13,23	3,14	
17	Kep. Bangka Belitung	457	1.151	64	457	1	6	1	325	26	249.313	14,47	4,64	
18	Kep. Riau	499	1.559	67	499	1	4	2	367	45	699.849	28,47	12,73	
19	Lampung	1.255	7.038	248	1.255	1	12	2	670	151	2.908.371	5,80	2,02	
20	Maluku	566	2.822	15	566	1	9	2	806	227	697.700	6,88	3,12	
21	Maluku Utara	330	2.129	19	330	1	7	2	644	97	487.777	9,40	2,69	
22	NTB	908	4.758	82	908	1	8	2	1.073	144	1.838.402	1,61	0,81	
23	NTT	1.370	7.605	232	1.370	1	20	1	994	465	2.195.148	3,86	1,56	

Indeks Aktivitas Literasi Membaca

No.	Provinsi	X3	X4	X5	X6	Jumlah Perpus-takaan Desa	Jumlah TBM dan Pustaka Bergerak	Jumlah penduduk	Persentase Rumah Tangga Membeli Surat ka-bar/koran	Persentase Rumah Tangga Membeli Majalah/Tabloid
		Jumlah Perpus-takaan Kondisi Baik	Jumlah Petugas Pengelola Perpus-takaan Sekolah	Jumlah Perpus-takaan Sekolah dalam Kondisi Baik	Jumlah Perpus-takaan Kabu-paten					
24	Papua	348	19	23	1	311	179	1.263.900	4,73	2,46
25	Papua Barat	213	13	9	1	265	97	365.251	4,67	2,16
26	Riau	1.404	194	9	1	656	38	2.479.797	10,45	4,05
27	Sulawesi Barat	314	98	6	1	575	121	514.945	1,73	2,35
28	Sulawesi Selatan	2.190	542	21	1	1.880	316	3.198.157	5,88	3,48
29	Sulawesi Tengah	919	100	11	1	854	122	1.088.039	2,29	1,38
30	Sulawesi Tenggara	731	64	14	1	1.060	99	1.036.013	7,44	3,32
31	Sulawesi Utara	851	16	11	1	652	30	816.672	19,48	4,71
32	Sumatera Barat	1.554	232	12	1	537	87	1.968.747	4,99	4,11
33	Sumatera Selatan	1.704	318	13	1	545	56	2.962.086	11,86	2,81
34	Sumatera Utara	3.633	193	24	1	1.305	162	5.537.405	10,04	3,45

Keterangan: Indikator jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik, petugas pengelola perpustakaan sekolah, dan pembeding jumlah sekolah diolah dari data mentah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK Kemdikbud); jumlah perpustakaan umum (di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa) diolah dari data Perpustakaan Nasional sedangkan pembeding jumlah wilayah administratif dari situs <http://mfidonline.bps.go.id>; jumlah perpustakaan komunitas diolah dari laman PT Pos Indonesia dengan pembeding jumlah penduduk usia 5-24 tahun dari publikasi *Provinsi Dalam Angka 2018* dan *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*; persentase membeli surat kabar dan majalah /tabloid diolah dari data data mentah Susenas MSBP 2015.

Data Awal Dimensi Alternatif

No.	Provinsi	Sekolah Memiliki Akses Internet	Jumlah Sekolah	Persentase penduduk mengakses internet	Persentase penduduk menggunakan komputer
		X9		X10	X11
1	Aceh	2.681	5.360	22,86	14,93
2	Bali	1.640	3.196	39,49	23,22
3	Banten	4.517	7.325	37,46	20,54
4	Bengkulu	850	2.042	26,71	18,54
5	D.I. Yogyakarta	1.627	2.455	45,38	27,43
6	D.K.I. Jakarta	3.085	4.622	60,65	33,40
7	Gorontalo	577	1.395	27,31	17,61
8	Jambi	1.804	3.543	26,67	17,08
9	Jawa Barat	18.571	29.526	37,02	19,83
10	Jawa Tengah	14.490	24.827	30,73	17,68
11	Jawa Timur	15.264	27.643	31,17	18,22
12	Kalimantan Barat	2.003	6.388	24,17	14,08
13	Kalimantan Selatan	1.878	3.835	31,37	17,97
14	Kalimantan Tengah	1.287	3.851	29,35	16,93
15	Kalimantan Timur	1.361	2.965	42,14	26,24
16	Kalimantan Utara	275	734	36,40	22,43
17	Kep. Bangka Belitung	593	1.151	28,86	16,59
18	Kepulauan Riau	776	1.559	48,35	28,23
19	Lampung	3.844	7.038	22,45	12,84
20	Maluku	655	2.822	24,42	17,18
21	Maluku Utara	665	2.129	18,80	13,65
22	Nusa Tenggara Barat	2.791	4.758	22,64	13,78
23	Nusa Tenggara Timur	3.417	7.605	17,88	12,90
24	Papua	735	3.598	16,51	10,93
25	Papua Barat	388	1.524	27,45	17,27
26	Riau	3.140	5.606	32,16	20,13
27	Sulawesi Barat	603	1.930	19,50	14,23

Indeks Aktivitas Literasi Membaca

No.	Provinsi	Sekolah Memiliki Akses Internet	Jumlah Sekolah	Persentase penduduk mengakses internet	Persentase penduduk menggunakan komputer
		X9		X10	X11
28	Sulawesi Selatan	4.923	9.123	30,35	20,54
29	Sulawesi Tengah	1.314	4.140	24,88	17,09
30	Sulawesi Tenggara	1.358	3.530	26,17	17,26
31	Sulawesi Utara	1.436	3.360	35,44	20,22
32	Sumatera Barat	2.810	5.530	29,63	21,78
33	Sumatera Selatan	4.008	6.921	25,65	15,46
34	Sumatera Utara	7.032	14.383	27,63	18,85

Keterangan: Indikator jumlah sekolah yang memiliki jaringan internet diolah dari data mentah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK Kemdikbud); sedangkan persentase penduduk yang mengakses internet dan menggunakan komputer dari data mentah Susenas Kor 2017.

Data Awal Dimensi Budaya

No.	Provinsi	Persentase penduduk membaca surat kabar/ koran atau majalah cetak	Persentase penduduk membaca buku cetak kitab suci	Persentase penduduk membaca berita/ artikel dari media elektronik, internet	Persentase penduduk mengunjungi perpustakaan	Persentase penduduk memanfaatkan taman bacaan
		X12	X13	X14	X15	X16
1	Aceh	22,13	35,73	16,54	13,14	0,59
2	Bali	15,08	30,30	22,17	14,09	0,34
3	Banten	9,54	29,01	21,00	10,72	1,01
4	Bengkulu	14,14	35,03	16,05	15,28	0,90
5	D.I. Yogyakarta	26,62	33,93	31,09	20,15	0,59
6	D.K.I. Jakarta	24,51	30,22	40,22	10,30	0,55
7	Gorontalo	11,87	31,04	15,40	14,76	0,83
8	Jambi	9,83	31,71	17,59	9,22	0,35
9	Jawa Barat	11,46	28,07	18,02	10,97	0,49
10	Jawa Tengah	8,99	25,72	14,37	10,95	0,48
11	Jawa Timur	10,85	25,72	15,91	10,45	0,89
12	Kalimantan Barat	8,79	26,61	13,77	7,33	0,38
13	Kalimantan Selatan	10,71	30,58	17,05	13,71	0,74
14	Kalimantan Tengah	12,14	33,03	18,95	8,92	0,97
15	Kalimantan Timur	16,36	33,41	28,30	12,99	1,03
16	Kalimantan Utara	21,68	35,80	25,69	12,67	0,04

No.	Provinsi	Persentase penduduk membaca surat kabar/ koran atau majalah cetak	X12	Persentase penduduk membaca buku cetak kitab suci	X13	Persentase penduduk membaca berita/ artikel dari media elektronik, internet	X14	Persentase penduduk mengunjungi perpustakaan	X15	Persentase penduduk memanfaatkan taman bacaan	X16
17	Kep. Bangka Belitung	15,66	X12	30,43	X13	16,50	X14	14,53	X15	0,28	X16
18	Kepulauan Riau	27,54		37,32		36,34		14,71		1,24	
19	Lampung	7,44		25,72		8,74		9,18		0,11	
20	Maluku	6,81		37,65		11,82		13,37		0,16	
21	Maluku Utara	9,20		36,23		8,47		8,14		0,28	
22	Nusa Tenggara Barat	7,71		31,87		11,80		12,56		0,58	
23	Nusa Tenggara Timur	7,64		33,22		10,13		7,88		0,18	
24	Papua	6,16		18,59		8,33		3,21		0,12	
25	Papua Barat	11,37		32,16		11,56		4,84		0,37	
26	Riau	13,62		34,26		19,38		10,56		0,37	
27	Sulawesi Barat	6,40		31,66		9,31		12,36		0,11	
28	Sulawesi Selatan	11,50		31,92		16,06		13,61		0,44	
29	Sulawesi Tengah	8,82		32,29		15,01		10,75		0,29	
30	Sulawesi Tenggara	9,78		38,33		12,88		12,18		0,47	
31	Sulawesi Utara	20,17		32,96		21,63		9,54		0,41	
32	Sumatera Barat	11,83		34,80		18,32		13,26		1,07	

No.	Provinsi	Persentase penduduk membaca surat kabar/ koran atau majalah cetak	Persentase penduduk membaca buku cetak kitab suci	Persentase penduduk membaca berita/ artikel dari media elektronik, internet	Persentase penduduk mengunjungi perpustakaan	Persentase penduduk memanfaatkan taman bacaan
		X12	X13	X14	X15	X16
33	Sumatera Selatan	12,99	32,36	15,27	10,87	0,52
34	Sumatera Utara	14,56	35,66	15,96	9,97	0,37

Keterangan: Indikator penduduk membaca surat kabar, buku cetak, berita/artikel di media elektronik/internet, serta penduduk yang mengunjungi perpustakaan dan taman bacaan diolah dari data mentah Susenas MSBP 2015.

Publikasi ini merupakan upaya Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud untuk menyiarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) 2018. Dari empat dimensi yang menjadi tolok ukur, yaitu dimensi kecakapan, dimensi akses, dimensi alternatif, serta dimensi budaya terlihat bahwa hanya pada dimensi kecakapan saja masyarakat kita sudah cukup baik, sementara di tiga dimensi lainnya masih perlu didorong kemajuannya. Kami berharap Indeks Alibaca bermanfaat bagi pengembangan program Gerakan Literasi Nasional agar ke depan dapat lebih optimal lagi. Begitu pula pemerintah daerah, pegiat literasi, serta masyarakat umum dapat mememanfaatkannya sebagai pedoman guna menyokong aktivitas literasi di daerah masing-masing. Dengan mengetahui aspek apa saja yang perlu dimajukan, maka upaya untuk meningkatkan aktivitas literasi di berbagai daerah di Indonesia dapat lebih terukur dan terarah.



Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-0792-35-6

